



BP3KSDMT

BALAI PENDIDIKAN PELATIHAN PEMBANGUNAN
KARAKTER SDM TRANSPORTASI



TAHUN 2025 - 2029 RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi Tahun 2025-2029 dapat terlaksana dengan baik. Renstra 2025-2029 ini merupakan dokumen yang berisi informasi tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dalam rencana kinerja yang telah ditetapkan serta tingkat atau target kinerja (berupa *output* dan atau *outcome*) yang dicapai oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi dalam tahun 2025-2029 untuk ikut serta mendukung terwujudnya rencana strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis ini merupakan salah satu wujud tekad Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan sebagai salah satu UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang transparan dan akuntabel dalam mencapai visi dan misi organisasi sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Kementerian Perhubungan.

Dengan diterbitkannya Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran, serta manfaat kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Harapan kami Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi seluruh komponen pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi.

Bandung, 30 Desember 2025

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
Pembangunan Karakter SDM Transportasi



Eko Sudarmanto, M.Pd., M.Mar.E
NIP. 197101262002121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1. Tugas dan Fungsi BP3KSDMT.....	3
1.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renstra BP3KSDMT Periode 2020-2024	6
1.2. Potensi dan Permasalahan BP3KSDMT.....	19
1.3. Peluang dan Tantangan BP3KSDMT	22
1.4. Analisis SWOT	24
1.5 Manajemen Risiko BP3KSDMT	27
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	30
2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Nasional	
Tahun 2025-2045.....	30
2.2 Visi dan Misi Presiden 2025-2029	33
2.3. Visi dan Misi Kementerian Perhubungan.....	36
2.4 Visi Misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan.....	42
2.5 Visi Misi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	
Perhubungan (PPSDMAP).....	43
2.6 Visi dan Misi BP3KSDMT	45
2.7 Tujuan dan Sasaran BP3KSDMT	46
2.8 Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan BP3KSDMT	52
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN	
KERANGKA KELEMBAGAAN	54
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	54
3.1.1 Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029.....	54
3.1.2 Arah Kebijakan Kementerian Perhubungan 2025-2029	59
3.1.3 Arah Kebijakan BPSDM Perhubungan 2025-2029.....	72
3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi PPSDMAP 2025-2029	76
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BP3KSDMT 2025-2029.....	78
3.3 Manajemen Risiko Indikator Kinerja Kegiatan BP3KSDMT	80

3.4	Kerangka Regulasi BP3KSDMT 2025-2029	83
3.5	Kerangka Kelembagaan BP3KSDMT 2025-2029	85
4.1	Target Kinerja BP3KSDMT	87
4.2	Kerangka Pendanaan BP3KSDMT 2025-2029	89
BAB V PENUTUP.....		99
5.1	Simpulan	99
5.2	Mekanisme Evaluasi dan Perubahan	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja BP3KSDMT Tahun 2020-2024 (sesuai Renstra 2020-2024).....	7
Tabel 1.2 Kondisi Eksisting Alokasi Awal Anggaran.....	8
Tabel 1.3 Kondisi Eksisting Alokasi Akhir Anggaran	8
Tabel 1.4 Kondisi Yang Diharapkan Alokasi Anggaran	9
Tabel 1.5 Target dan Realisasi PNBP 2020-2024	9
Tabel 1.6 Pagu Penggunaan PNBP dan Realisasi PNBP 2020-2024	9
Tabel 1.7 Capaian Perjanjian Kinerja BP3KSDMT Tahun 2020-2024	10
Tabel 1.8 Jumlah Pegawai Tahun 2024	18
Tabel 1.9 Kondisi Eksisting Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	18
Tabel 1.10 Kondisi Yang Diharapkan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19
Tabel 1.11 Usulan Diklat BP3KSDMT	19
Tabel 1.12 Analisis Kekuatan dan Kelemahan	24
Tabel 1.13 Analisis Peluang dan Ancaman	25
Tabel 2.1 Konsep Visi Misi Kementerian Perhubungan.....	40
Tabel 2.2 Struktur Muatan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan	41
Tabel 2.3 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan	41
Tabel 2.4 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BPSDMP	48
Tabel 2.5 Sasaran Program/Kegiatan BP3KSDMT	49
Tabel 2.6 Indikator Kinerja Program/Kegiatan BP3KSDMT	49
Tabel 3.1 Indikasi Program Prioritas Nasional terkait BPSDM	58
Tabel 3.2 Identifikasi Risiko Berdasarkan Sasaran dan Indikator	81
Tabel 4.1 Sasaran Strategis Program BP3KSDMT	87
Tabel 4.2 Target Capaian Kinerja BP3KSDMT Tahun 2025-2029.....	87
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Program/Kegiatan BP3KSDMT	88
Tabel 4.4 Kebutuhan Anggaran Per Tahun BP3KSDMT	90
Tabel 4.5 Target PNBP BP3KSDMT Tahun 2025-2029	91
Tabel 4.6 Rekap Alokasi Berdasarkan Program/Kegiatan Renstra BP3KSDMT 2025-2029	91
Tabel 4.7 Rekap Alokasi Kegiatan Program Dukungan Manajemen (WA)	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP3KSDMT.....	6
Gambar 1.2 Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.....	28
Gambar 2.1 Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	31
Gambar 2.2 Pentahapan Implementasi RPJP Nasional Tahun 2025-2045	31
Gambar 2.3 Strategi Besar Mencapai Indonesia Emas 2045	32
Gambar 2.4 Fokus Arah Kebijakan Tahun 2025-2045 Tahap I	33
Gambar 2.5 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (<i>Quick Wins</i>)	35
Gambar 2.6 Asta Cita Sebagai Prioritas Pembangunan.....	36
Gambar 3.1 Peran Pembangunan Wilayah dalam Mendukung Pencapaian Visi Misi Program Prioritas	56
Gambar 3.2 Penyusunan Renstra BPSDMP Tahun 2025-2029	75
Gambar 4.1 Grafik Pagu Jangka Menengah BP3KSDMT Periode 2025-2029	90
Gambar 4.2 Grafik Sumber Pendanaan BP3KSDMT Periode 2025-2029	90
Gambar 4.3 Strategi Besar Mencapai Indonesia Emas 2045	92

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Dalam rangka terwujudnya sumber daya manusia transportasi yang prima, profesional, dan beretika dalam penyelenggaraan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, maka diperlukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang terarah, sesuai dengan karakteristik operasional yang dibutuhkan. Maka dari itu, perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perhubungan harus diprioritaskan sesuai amanat dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Sejalan dengan upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang handal, berdaya saing, memberikan nilai tambah bagi masyarakat, dan siap menghadapi tantangan kemajuan pesat di bidang transportasi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi harus menyiapkan Sumber Daya Manusia transportasi melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang meliputi transportasi moda darat, laut, udara dan perkeretaapian baik sebagai moda tunggal maupun multimoda serta kompetensi manajerial. Pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan diselenggarakan melalui berbagai program diklat dan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan sehingga program-program yang dilaksanakan dapat berjalan efisien, optimal dan berhasil.

Dalam kaitannya untuk mencapai tingkat yang optimal dalam pendidikan, pelatihan dan penyuluhan transportasi dalam pembangunan bidang transportasi yang menjadi bagian dalam upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam Visi Indonesia Emas 2045. Dalam upaya mendukung visi tersebut, visi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menggaris bawahi pentingnya "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Sebagai bagian dari Kementerian Perhubungan, maka diperlukan penetapan sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai tupoksi yang mampu memberikan panduan, arahan dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan transportasi dimaksud, sehingga perlu

dilakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi Tahun 2025-2029 harus sejalan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang secara garis besar menjadi pedoman dan arah pembangunan untuk periode 20 tahun ke depan serta menjadi acuan setiap tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Adapun visi pembangunan nasional 2025-2045 adalah "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-4 (2020-2024), RPJM ke-5 (2025-2029) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Dalam pelaksanaannya, Renstra menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). Dalam konteks penganggaran, RKA K/L ditransformasikan ke dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Kesinambungan antar dokumen harus selalu dijaga sehingga dapat memberikan rujukan dalam penetapan / perencanaan kinerja jangka menengah dan tahunan. Dalam rangkaian kegiatan perencanaan tersebut, evaluasi/*review* terhadap Renstra menjadi sangat penting sebagai pengendalian.

Secara keseluruhan, perencanaan strategis bagi Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi berperan krusial untuk meningkatkan kualitas SDM yang handal, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global di sektor transportasi. Tanpa perencanaan yang baik, akan sulit untuk mencapai tujuan jangka panjang yang diinginkan dan memenuhi standar yang ditetapkan

oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu perlu disusun Perencanaan strategis sebagai dasar pelaksanaan program.

1.1.1. Tugas dan Fungsi BP3KSDMT

Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Struktur Organisasi BP3KSDMT telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi seperti yang akan disampaikan pada berikut ini:

- a. Kedudukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- b. Tugas Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi melaksanakan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter SDM transportasi.
- c. Fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi yaitu:
 - Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
 - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen diri, manajemen hubungan antar personal, manajemen organisasi kerja, dan manajemen spiritual;
 - Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
 - Pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
 - Pelaksanaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, dan kerumahtanggaan.

d. Struktur Organisasi BP3KSDMT

Susunan organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi terdiri atas:

1. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan;
4. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Penunjang.

Susunan organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi sebagaimana dimaksud, tercantum dalam bagan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan.

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengamanan dalam, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, evaluasi dan pelaporan.
2. Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan program, penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta kerja sama diklat.
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Unit Penunjang merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi.

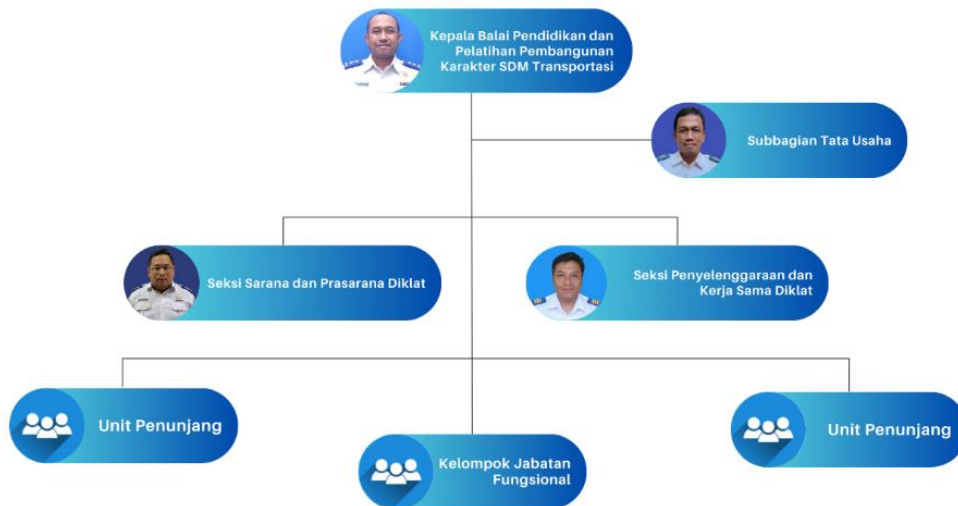
Unit penunjang dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi. Kepala unit penunjang merupakan tenaga fungsional tertentu atau fungsional umum yang diberi tugas tambahan untuk membantu Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi dalam mengkoordinasikan kegiatan di dalam Unit Penunjang, Unit Penunjang Terdiri dari:

- Unit Layanan Kesehatan;
- Unit Teknik Umum dan Asrama;
- Unit Bimbingan dan Konseling;
- Unit Fasilitas Pelatihan Luar Ruang;
- Unit Teknologi Informatika;
- Unit Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan (PMMK).

Unit Penunjang dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh:

1. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan:
 - Unit Layanan Kesehatan;
 - Unit Bimbingan dan Konseling;
 - Unit Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan (PMMK).
2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan:
 - Unit Fasilitas Pelatihan Luar Ruang;
 - Unit Teknik Umum dan Asrama;

- Unit Teknologi Informatika.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP3KSDMT

Renstra Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi Tahun 2025-2029 merangkum berbagai upaya dari seluruh Bidang di Lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga menghasilkan keluaran kegiatan (*outputs*) serta manfaat dari hasil kegiatan (*outcomes*) dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

1.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renstra BP3KSDMT Periode 2020-2024

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Renstra BP3KSDMT Tahun 2025-2029 harus memperhatikan berbagai capaian dan juga permasalahan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra pada periode sebelumnya. Evaluasi pelaksanaan Renstra BP3KSDMT Tahun 2020-2024 sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tahun dasar (*base-line*) 2024, serta mengambil pelajaran atas berbagai permasalahan yang dihadapi pada periode sebelumnya.

a. Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Diklat

Evaluasi atas capaian kinerja berupa realisasi dari target pencapaian Sasaran BP3KSDMT Tahun 2020-2024 yang diukur melalui pemenuhan Indikator Kinerja yang ditetapkan, disampaikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja BP3KSDMT Tahun 2020-2024 (sesuai Renstra 2020-2024)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	SP.WA.03 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	IKP.1 Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	78	75	96,15	79	75	94,94	79,5	79,5	100	77	77	100	80,5	80,5	100
2	SK.WA.03.01 Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP	IKK.8 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP	%	90	100	111,11	90	-	-	90	100	111,11	100	100	100	90	90	100
3	SK.WA.03.02 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	IKK.26 Jumlah Peserta Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang kompeten	Orang	1200	1200	100	400	400	100	7956	7956	100	6070	6070	100	7400	9208	124,43
		IKK.27 Persentase Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang kompeten	%	85	100	117,65	85	100	117,65	85	100	117,65	100	100	100	100	100	100
4	SK.WA.03.03 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan akuntabel	IKK.13 Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level	3,2	2,986	93,31	3,3	3	90,91	3,4	3	88,24	3,1	3,1	100	3,15	3,15	100
		IKK.14 Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP	Nilai	91	91	100,00	91,5	91	99,45	91,7	91	99,24	91,9	91,9	100	92	92	100
		IKK.15 Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai	75	76	101,33	76	76	100	77	76	98,70	78	78	100	80	80	100
		IKK.16 Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai	80,2	84	104,74	84,2	84	99,76	86,2	84	97,45	88,2	88,2	100	90,2	90,2	100
		IKK.17 Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai	78	80	102,56	80	80	100	82	80	97,56	84	84	100	85	85	100
		IKK.18 Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai	85	81,91	96,36	85	82,14	96,64	90	80,53	89,48	76,14	76,14	100	80	80	100
5	SK.WA.03.04 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDMP Perhubungan	IKK.19 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP	Nilai	70	71	101,43	71	71	100	72	71	98,61	73	73	100	74	74	100
		IKK.24 Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai	0,8	0,9	112,50	0,9	0,9	100	0,92	0,9	97,83	0,96	0,96	100	1	1	100
6	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	IKK.25 Indeks SPBE BPSDMP	%	90	90	100	90	-	-	90	100	111,11	90	90	100	90	90	100

Sumber: Diolah dari LKIP BP3KSDMT Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan Capaian Kinerja Triwulan III 202

Penilaian terhadap capaian kinerja BP3KSDMT dilakukan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program kerja berdasarkan indikator kinerja. Analisis ini mencakup evaluasi target dan realisasi dari 2020-2024 untuk memberikan rekomendasi perbaikan berbasis bukti.

b. Capaian Rencana Alokasi dan Realisasi Pendanaan

Rencana alokasi anggaran dan realisasi pendanaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi pada periode Renstra 2020-2024 belum tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terdapat kesenjangan (gap) anggaran yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang memengaruhi pola belanja pemerintah sejak tahun 2020 hingga 2024. Adapun perbandingan antara rencana pendanaan, alokasi pendanaan, realisasi penyerapan anggaran, serta penerimaan PNPB pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Kondisi Saat Ini (2020-2024)

Tabel 1.2 Kondisi Eksisting Alokasi Awal Anggaran

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi Awal Anggaran	Rp41.774.053.000	Rp44.954.294.000	Rp40.573.584.000	Rp36.244.450.000	Rp37.962.208.000

Tabel 1.3 Kondisi Eksisting Alokasi Akhir Anggaran

Tahun	Rupiah Murni	PNBP	Total	Realisasi	Capaian (%)
2020	17,525,884,000	2,128,000,000	19,653,884,000	17,854,719,457	90.85
2021	20,231,026,000	820,575,000	21,051,601,000	20,535,617,358	97.55
2022	32,087,453,000	7,044,240,000	39,131,693,000	38,989,125,216	99.64
2023	31,670,125,000	5,755,325,000	37,425,450,000	37,422,920,016	99.99
2024	33,023,681,000	10,031,976,000	43,055,657,000	42,693,246,515	99.16

2. Kondisi Yang Diharapkan (2025-2029)

Tabel 1.4 Kondisi Yang Diharapkan Alokasi Anggaran

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029
Alokasi Anggaran	Rp42.031.052.000	Rp61.344.522.000	Rp54.759.079.000	Rp59.290.532.000	Rp64.445.636.000
Alokasi yang diharapkan	Rp75.924.416.000	Rp83.516.857.600	Rp96.044.386.240	Rp110.451.044.176	Rp127.018.700.802

c. Realisasi Penerimaan & Penggunaan PNB

Tabel 1.5 Target dan Realisasi PNB 2020-2024

No.	Tahun	Target PNB	Realisasi	%
1	2020	6.776.930.000	747.325.500	11,03
2	2021	7.846.011.000	658.786.020	8,40
3	2022	4.002.100.000	7.415.356.438	185,29
4	2023	4.082.060.000	6.135.250.896	150,30
5	2024	6.048.450.000	10.559.995.700	174,59

Tabel 1.6 Pagu Penggunaan PNB dan Realisasi PNB 2020-2024

No.	Tahun	Pagu Penggunaan PNB	Realisasi	%
1	2020	2.128.000.000	709.950.000	33,36
2	2021	820.575.000	625.822.750	76,27
3	2022	7.044.240.000	7.044.156.465	100,00
4	2023	5.755.325.000	5.754.568.555	99,99
5	2024	10.031.976.000	10.031.969.463	100,00

d. Capaian Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi

Tabel 1.7 Capaian Perjanjian Kinerja BP3KSDMT Tahun 2020-2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	SP.WA.03 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	IKP.1 Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	78	75	96,15	79	75	94,94	79,5	79,5	100	77	77	100	80,5	80,5	100
2	SK.WA.03.01 Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP	IKK.8 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP	%	90	100	111,11	90	-	-	90	100	111,11	100	100	100	90	90	100
3	SK.WA.03.02 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	IKK.26 Jumlah Peserta Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang kompeten	Orang	1200	1200	100	400	400	100	7956	7956	100	6070	6070	100	7400	9208	124,43
		IKK.27 Persentase Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang kompeten	%	85	100	117,65	85	100	117,65	85	100	117,65	100	100	100	100	100	100
4	SK.WA.03.03 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan akuntabel	IKK.13 Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level	3,2	2,986	93,31	3,3	3	90,91	3,4	3	88,24	3,1	3,1	100	3,15	3,15	100
		IKK.14 Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP	Nilai	91	91	100,00	91,5	91	99,45	91,7	91	99,24	91,9	91,9	100	92	92	100
		IKK.15 Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai	75	76	101,33	76	76	100	77	76	98,70	78	78	100	80	80	100
		IKK.16 Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai	80,2	84	104,74	84,2	84	99,76	86,2	84	97,45	88,2	88,2	100	90,2	90,2	100
		IKK.17 Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai	78	80	102,56	80	80	100	82	80	97,56	84	84	100	85	85	100
		IKK.18 Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai	85	81,91	96,36	85	82,14	96,64	90	80,53	89,48	76,14	76,14	100	80	80	100
5	SK.WA.03.04 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	IKK.19 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP	Nilai	70	71	101,43	71	71	100	72	71	98,61	73	73	100	74	74	100
		IKK.24 Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai	0,8	0,9	112,50	0,9	0,9	100	0,92	0,9	97,83	0,96	0,96	100	1	1	100
6	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	IKK.25 Indeks SPBE BPSDMP	%	90	90	100	90	-	-	90	100	111,11	90	90	100	90	90	100

Sumber: Diolah dari LKIP BP3KSDMT Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Capaian Kinerja Triwulan III 2024

Adapun hasil analisis atas tabel 1.7 diatas diuraikan sebagai berikut:

1) IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan

Indeks RB Kementerian Perhubungan yang ditargetkan Terealisasi dengan baik, sehingga persentasenya sebesar 100%.

➤ Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapainya target capaian pada sasaran strategis IKP.1 adalah meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi.

➤ Alternatif Solusi

Pencapaian indikator Indeks RB Kementerian Perhubungan tahun 2023 sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan mutu di tahun berikutnya.

2) IKK. 8 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP

Capaian IKK Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi berkaitan dengan kegiatan promosi dan kerjasama diklat secara langsung maupun tidak langsung (online). Dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pendapatan atau PNBK pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi serta mengenalkan atau mempublish apa saja fasilitas yang satker kami punya. Sehingga BP3KSDMT mampu melaksanakan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP dengan baik, Promosi dan Kerjasama diklat yang sudah kami lakukan di tahun 2024 diantaranya;

- Kerjasama Diklat dengan PT. Dirgantara Indonesia;
- Kerjasama Diklat dengan SMKN 8 Bandung;
- Kerjasama Diklat dengan Kodiklat TNI AD;
- Kerjasama Diklat dengan seluruh satker di lingkungan BPSDM Perhubungan;

- Kerjasama Diklat dengan Bank Negara Indonesia (BNI).
- **Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**
Tercapainya target capaian pada sasaran strategis IKK.8 adalah terus meningkatkan kualitas Kerjasama yang dilakukan oleh Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi dengan berbagai macam stakeholder nya.
- **Alternatif Solusi**
Pencapaian indikator Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP tahun 2024 sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan mutu di tahun berikutnya.

3) IKK. 26. Jumlah Peserta Diklat SDM Aparatur Perhubungan Yang Kompeten

Tabel 1.1 menjelaskan bawah BP3KSDMT mampu melaksanakan Diklat Pembangunan Karakter dengan baik, dengan realisasi yang setiap tahunnya tercapai target 100%.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**
Tercapainya target capaian pada sasaran strategis IKK.26 adalah terus meningkatkan kualitas Kerjasama yang dilakukan oleh Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi dengan berbagai macam stakeholder nya sehingga menghasilkan program diklat yang dilaksanakan oleh BP3KSDMT.

4) IKK. 27 Persentase Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten

Capaian Lulusan Diklat Pembangunan Karakter realisasi nya setiap tahun mencapai dan melebihi target sehingga Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi mampu menghasilkan lulusan diklat pembangunan karakter yang kompeten dan sesuai target yang direncanakan.

➤ **Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**

Tercapainya target capaian pada sasaran strategis IKK.27 adalah terus meningkatkan kualitas Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi dengan berbagai macam stakeholdernya sehingga menghasilkan program diklat yang dilaksanakan oleh BP3KSDMT.

5) IKK.13 Indeks Maturitas SPIP BPSDMP

Capaian Indeks Maturitas SPIP BPSDMP menunjukkan peningkatan yang baik, namun mengalami penurunan dan ada peningkatan kembali di tahun 2023 sampai tahun berikutnya. Diharapkan di tahun berikutnya Meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan Kerjasama diklat antara instansi pemerintah atau swasta, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi.

➤ **Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan**

Pada tahun 2024 realisasi pencapaian Indeks Maturitas SPIP sebesar 3,15 Pencapaian tersebut merupakan hasil dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi.

➤ **Alternatif solusi**

Meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan Kerjasama diklat antara instansi pemerintah atau swasta, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi.

6) IKK.14 Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP

Capaian Indeks Pengawas Kearsipan BPSDMP pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi mampu melaksanakan pelayanan kepegawaian

dengan baik, namun mengalami penurunan di tahun 2022 dan ada peningkatan kembali di tahun berikutnya.

➤ **Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan**

Tata Kelola Kearsipan sangat penting untuk menunjang tertib administrasi. Sehingga pengelola kearsipan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi dapat dilaksanakan sesuai prosedur.

➤ **Alternatif solusi**

Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kearsipan sesuai prosedur.

7) **IKK.15 Indeks Pengelolaan Aset BPSDMP**

Capaian Indeks Pengelolaan Aset Pada Tahun 2024 sebesar 100,00% hal ini Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi mampu melaksanakan pengelolaan aset dengan baik.

➤ **Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan**

Kepatuhan Pelaporan BMN sangat berpengaruh terhadap indeks pengelolaan aset, Laporan BMN tersebut terdiri dari (Laporan BMN Semester 1, Semester 2, dan Laporan Wasdal), Untuk itu Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi dapat menyusun Pelaporan BMN sesuai peraturan dan prosedur.

8) **IKK.16 Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP**

Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi terdapat penurunan di tahun 2021 dan 2022 tetapi Pada tahun 2023 dan 2024 terdapat peningkatan dengan Nilai Indeks Pengelolaan Aset BPSDMP 100%. Sehingga BP3KSDMT mampu melaksanakan Pengelolaan Keuangan dengan baik.

➤ **Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan**

Keberhasilan tersebut dicapai dengan mengoptimalkan seluruh transaksi keuangan dari mulai pengajuan sampai dengan terbentuknya laporan keuangan serta terus mengikuti peraturan dan prosedur keuangan dari KPPN maupun BPSDMP.

➤ **Alternatif solusi**

Melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dalam proses penyelenggaraan pengelolaan keuangan.

9) IKK.17 Indeks Perencanaan BPSDMP

Capaian Indeks Perencanaan BPSDMP pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi Pada tahun 2024 Nilai Indeks Perencanaan BPSDMP tercapai 85 dengan capaian 100%. Sehingga BP3KSDMT mampu melaksanakan Pengelolaan Keuangan dengan baik.

➤ **Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan**

kesesuaian sasaran program perencanaan sangat berpengaruh terhadap indeks Perencanaan BPSDMP.

10)IKK. 18 Nilai SAKIP BPSDMP

Indeks Nilai SAKIP Pencapaian di bawah target pada 2020 dan 2022 mengindikasikan kelemahan dalam dokumentasi atau pelaporan kinerja. Namun di tahun 2023 ada peningkatan dengan capaian 100% sampai tahun berikutnya.

➤ **Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan**

Nilai SAKIP merupakan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atas pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Oleh karena itu Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi berupaya

memenuhi indikator penilaian SAKIP diantaranya, Pembuatan PK, Renstra, Capaian kinerja sehingga mendapatkan nilai sakip yg berorientasi baik oleh Kementerian PAN dan RB.

➤ **Alternatif solusi**

Melakukan Penilaian dan Pengawasan terhadap indikator penilaian SAKIP yang terdiri dari, Pembuatan PK, Renstra, dan Capaian kinerja.

11)IKK. 19 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP

Capaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi sesuai target dengan realisasi 100%, sehingga BP3KSDMT mampu melaksanakan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP dengan baik.

➤ **Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan**

Dalam meningkatkan penyelenggaraan perkantoran BPSDMP pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi, dengan mempelajari dan menjalankan Lingkup penyelenggaraan perkantoran meliputi aspek K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja), serta terdapat indikator lain dalam mencapai tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP.

12)IKK.24 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP

Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP Realisasi konsisten memenuhi (100% pada 2024) sehingga BP3KSDMT mampu melaksanakan Tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP dengan baik.

➤ **Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan**

Penilaian indeks tata Kelola manajemen ASN BPSDMP bertujuan sebagai dasar pengembangan kompetensi pegawai dan Disiplin Pegawai.

➤ **Alternatif solusi**

Adanya Penilaian dan mendorong setiap pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai kualifikasi pegawai serta menerapkan disiplin pegawai dan tepatan waktu untuk pemrosesan administrasi pegawai, seperti Pangkat/jabatan ASN, Gaji, Tunjangan dan pengelolaan SK Pensiun.

13)IKK.25 Indeks SPBE BPSDMP

Capaian Indeks SPBE BPSDMP Realisasi konsisten memenuhi (100% pada 2024). sehingga BP3KSDMT mampu melaksanakan kegiatan SPBE BPSDMP dengan baik.

➤ **Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan**

Sistem Informasi yang ada pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi tahun 2023 dapat diakses dengan baik sehingga tercapai target sebesar 100%. System informasi tersebut yaitu Aplikasi Pendaftaran Diklat, Aplikasi Akademik (SIKAD) aplikasi tersebut baru digunakan dan masih terus dilakukan pengembangan sehingga dalam penggunaannya belum dapat diakses secara maksimal.

➤ **Alternatif solusi**

Mendorong seluruh kegiatan yang ada di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi yang berbasis aplikasi atau website untuk meningkatkan efektivitas suatu kegiatan.

e. Capaian Pelaksanaan Program

- 1) Pada tahun 2020 – 2024 Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi telah melaksanakan Diklat Pembentukan Karakter untuk instansi Kementerian Perhubungan maupun Instansi Eksternal dengan jumlah total target peserta diklat terpenuhi dengan capaian 100% dan di tahun 2024 melebihi target dengan capaian 124,43%.

- 2) Pada tahun 2022 – 2024 Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi telah melaksanakan Diklat PNBP untuk instansi Kementerian Perhubungan maupun Instansi Eksternal dengan capaian realisasi melebihi capaian target di tahun 2022 – 2024 dengan capaian realisasi di atas 100%.

f. Jumlah Pegawai BP3KSDMT

Tabel 1.8 Jumlah Pegawai Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Kepala BP3KSDMT	1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3	Staf Sub Bagian Tata Usaha	16
4	Kepala Seksi Penyelenggara dan Kerjasama Diklat	1
5	Staf Seksi Penyelenggara dan Kerjasama Diklat	10
6	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	1
7	Staf Seksi Sarana dan Prasarana	5
8	Widyaiswara	4
9	Dokter	1
10	Perawat	3
Jumlah Total		43

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung juga oleh Sumber Daya Manusia dalam jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025.

g. Aspek Sumber Daya Manusia

- 1) Kondisi Saat Ini (2020 – 2024)

Tabel 1.9 Kondisi Eksisting Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pegawai (PNS dan PPPK)	Jumlah				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Tenaga Pendidik	4	4	4	4	4
b. Tenaga Kependidikan	27	27	32	44	43

2) Kondisi Yang Diharapkan (2025 – 2029)

Tabel 1.10 Kondisi Yang Diharapkan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pegawai (PNS dan PPPK)	Jumlah				
	2025	2026	2027	2028	2029
a. Tenaga Pendidik	18	18	18	18	18
b. Tenaga Kependidikan	55	68	76	82	92

h. Usulan Diklat Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi 2025 – 2029

Tabel 1.11 Usulan Diklat BP3KSDMT

No.	Usulan Kegiatan	Target Jumlah Peserta (Orang)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Diklat Pembangunan Karakter PKA	80	80	80	80	80
2	Diklat Pembangunan Karakter PKP	80	80	80	80	80
3	Diklat Pembakar PNS dan PPPK	50	200	200	200	200
4	Diklat Pembangunan Karakter CPNS	2520	2960	2960	2960	2960
5	Diklat Pembangunan Karakter Tingkat SMA/SMK (Pola Pembibitan)	712	700	700	700	700
6	Diklat Pembangunan Karakter Bagi Masyarakat Umum/Kerjasama	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Diklat Training of Facilitator (TOF) Pengasuh Taruna/Mahasiswa	0	200	200	200	200
Total		7.042	10.220	10.220	10.220	10.220

1.2. Potensi dan Permasalahan BP3KSDMT

Bangsa yang besar yang dapat dilihat dari kualitas/ karakter bangsa (manusia) itu sendiri. Dilihat dari segi manajemen suatu organisasi, maka unsur manusia merupakan unsur yang paling utama dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional, sangat tergantung pada kesempurnaan potensi dari pengelola Negara seperti Aparatur Negara. BP3KSDMT terus berupaya untuk berbenah dan mengevaluasi diri dalam rangka menghadapi tantangan untuk membangun karakter sumber daya manusia, khususnya pembangunan karakter sumber daya manusia di bidang transportasi. Adapun potensi dan permasalahan adalah sebagai berikut:

A. Potensi BP3KSDMT

1. Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola

BP3KSDMT memiliki posisi strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah BPSDM Perhubungan yang secara khusus bertanggung jawab dalam pengembangan karakter SDM transportasi. Keberadaan BP3KSDMT memperkuat peran Kementerian Perhubungan dalam membangun SDM yang berintegritas, beretika, dan berorientasi pada keselamatan. Struktur organisasi dan tata kelola yang telah terbentuk menjadi modal penting dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan karakter secara berkelanjutan.

2. Aspek Kebijakan dan Regulasi

BP3KSDMT didukung oleh berbagai kebijakan nasional terkait pembangunan SDM, reformasi birokrasi, serta penguatan nilai-nilai ASN BerAKHLAK. Arah kebijakan BPSDM Perhubungan yang menempatkan pembangunan karakter sebagai fondasi kompetensi SDM transportasi menjadi peluang besar bagi BP3KSDMT untuk memperluas cakupan dan kualitas program pelatihan.

3. Aspek Sumber Daya Manusia

BP3KSDMT memiliki widyaiswara dan tenaga pengajar yang memahami substansi pengembangan karakter, kepemimpinan, dan etika pelayanan publik. Selain itu, SDM administrasi memiliki pengalaman dalam pengelolaan program pelatihan, anggaran, serta pelaporan kinerja. Hal ini menjadi potensi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan yang efektif dan akuntabel.

4. Aspek Program dan Kurikulum

Program pelatihan yang diselenggarakan telah disusun secara sistematis dan berorientasi pada pembentukan karakter aparatur transportasi. Kurikulum yang dimiliki bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebijakan serta kebutuhan unit teknis. Potensi pengembangan modul berbasis isu aktual, seperti integritas, keselamatan transportasi, dan budaya kerja profesional, menjadi nilai tambah bagi BP3KSDMT.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

BP3KSDMT memiliki sarana dan prasarana pendukung pelatihan, seperti ruang kelas, asrama, dan fasilitas penunjang lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Fasilitas yang tersedia menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan pelatihan secara tatap muka serta dapat dikembangkan untuk mendukung pembelajaran campuran (*blended learning*).

6. Aspek Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi BP3KSDMT untuk memperluas jangkauan pelatihan melalui pembelajaran daring. Dukungan awal infrastruktur teknologi dan sistem informasi pelatihan menjadi potensi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta aksesibilitas program pelatihan karakter.

7. Aspek Kerja Sama dan Jejaring

BP3KSDMT memiliki peluang besar untuk menjalin kerja sama dengan unit teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan, instansi pemerintah lain, perguruan tinggi, serta lembaga pelatihan. Jejaring kerja sama ini dapat dimanfaatkan untuk pengayaan materi, peningkatan kualitas pengajar, dan pengembangan inovasi pelatihan.

B. Permasalahan BP3KSDMT

1. Aspek Anggaran

Keterbatasan dan fluktuasi anggaran masih menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan program BP3KSDMT. Perubahan kebijakan penganggaran, khususnya pada periode terdampak pandemi, menyebabkan terjadinya kesenjangan antara rencana dan realisasi anggaran, sehingga memengaruhi optimalisasi penyelenggaraan pelatihan.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah widyaiswara dan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi khusus di bidang pembangunan karakter masih terbatas. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan belum sepenuhnya merata, sehingga memerlukan strategi pengembangan kapasitas yang lebih terencana.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

Sebagian sarana dan prasarana memerlukan pemeliharaan dan peremajaan agar tetap layak dan mendukung proses pembelajaran yang optimal. Keterbatasan fasilitas pendukung teknologi informasi juga menjadi kendala dalam pengembangan pembelajaran digital.

4. Aspek Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelatihan belum optimal. Kesiapan SDM dalam mengoperasikan sistem pembelajaran digital serta keterbatasan integrasi sistem informasi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

5. Aspek Program dan Penyelenggaraan

Metode pembelajaran yang digunakan belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan kebutuhan peserta dan perkembangan lingkungan strategis. Selain itu, mekanisme evaluasi dampak pelatihan terhadap peningkatan kinerja dan perilaku peserta masih perlu diperkuat.

6. Aspek Koordinasi dan Sinergi

Koordinasi antara BP3KSDMT dengan unit teknis dan pemangku kepentingan lainnya belum sepenuhnya optimal. Sinkronisasi antara kebutuhan pelatihan dengan perencanaan program masih perlu ditingkatkan agar pelatihan yang diselenggarakan lebih tepat sasaran.

7. Aspek Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi pelatihan belum terintegrasi secara menyeluruh. Data capaian kinerja dan hasil pelatihan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan program ke depan.

1.3. Peluang dan Tantangan BP3KSDMT

A. Peluang BP3KSDMT

1. Meningkatnya kebutuhan pengembangan karakter SDM transportasi

Tuntutan profesionalisme, integritas, dan budaya keselamatan di sektor transportasi semakin meningkat, sehingga membuka peluang bagi BP3KSDMT untuk memperluas peran dan cakupan pelatihan.

2. Dukungan kebijakan pembangunan SDM dan reformasi birokrasi Kebijakan nasional yang menekankan penguatan nilai ASN BerAKHLAK dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi dasar kuat bagi pengembangan program pelatihan karakter.
 3. Perkembangan teknologi pembelajaran
Kemajuan teknologi informasi membuka peluang penerapan pembelajaran daring dan *blended learning* yang lebih fleksibel, efisien, dan menjangkau peserta lebih luas.
 4. Peluang kerja sama dan kolaborasi
Terbukanya peluang kerja sama dengan unit teknis Kementerian Perhubungan, instansi pemerintah lain, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan untuk pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas pelatihan.
 5. Meningkatnya kesadaran stakeholder terhadap pentingnya karakter SDM
Stakeholder semakin memahami bahwa karakter SDM berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi.
- B. Tantangan BP3KSDMT
1. Keterbatasan dan fluktuasi anggaran
Perubahan kebijakan anggaran pemerintah berdampak pada kesinambungan dan skala pelaksanaan program pelatihan.
 2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi widyaiswara
Ketersediaan tenaga pengajar khusus bidang pembangunan karakter masih terbatas dan memerlukan penguatan kapasitas secara berkelanjutan.
 3. Perubahan kebutuhan dan dinamika lingkungan strategis Perkembangan kebijakan, teknologi, dan tuntutan stakeholder yang cepat menuntut BP3KSDMT untuk selalu adaptif.
 4. Kesiapan sarana, prasarana, dan teknologi
Keterbatasan fasilitas dan dukungan teknologi pembelajaran menjadi tantangan dalam optimalisasi pelatihan digital.
 5. Koordinasi dan sinergi lintas unit
Belum optimalnya koordinasi dengan unit teknis dan stakeholder dapat memengaruhi ketepatan sasaran dan efektivitas pelatihan.

1.4. Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal BP3KSDMT sebagai dasar dalam perumusan strategi dan arah kebijakan. Analisis ini mencakup kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) yang berasal dari kondisi internal organisasi, serta peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal.

Melalui identifikasi kekuatan dan peluang, BP3KSDMT diharapkan mampu mengoptimalkan peran dan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung pengembangan karakter SDM transportasi. Sementara itu, identifikasi kelemahan dan ancaman menjadi dasar untuk menyusun langkah perbaikan dan mitigasi risiko agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Hasil analisis SWOT selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam penyusunan strategi pengembangan BP3KSDMT, yang dirumuskan ke dalam strategi SO, WO, ST, dan WT. Strategi tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan lingkungan strategis serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BP3KSDMT.

Tabel 1.12 Analisis Kekuatan dan Kelemahan

Aspek	<i>Strengths</i> (Kekuatan)	<i>Weaknesses</i> (Kelemahan)
Kelembagaan & Tata Kelola	Memiliki kedudukan strategis sebagai UPT BPSDM Perhubungan dengan mandat jelas dalam pengembangan karakter SDM transportasi.	Tata kelola dan proses bisnis belum sepenuhnya terdokumentasi dan terstandar secara optimal.
Kebijakan & Regulasi	Didukung kebijakan nasional pembangunan SDM dan reformasi birokrasi.	Implementasi kebijakan belum sepenuhnya seragam di seluruh program pelatihan.
Sumber Daya Manusia	Memiliki widyaiswara dan SDM berpengalaman dalam penyelenggaraan diklat karakter.	Jumlah widyaiswara bidang pembangunan karakter masih terbatas.
Program & Kurikulum	Program pelatihan terstruktur dan relevan dengan kebutuhan karakter ASN transportasi.	Kurikulum belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan kebutuhan peserta.
Sarana & Prasarana	Tersedia ruang kelas, asrama, dan fasilitas pendukung pelatihan.	Sebagian fasilitas membutuhkan perawatan dan pembaruan.
Teknologi Informasi	Tersedia dukungan awal pemanfaatan teknologi pembelajaran.	Pemanfaatan sistem pembelajaran digital belum optimal.

Aspek	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
Kerja Sama & Jejaring	Peluang kerja sama dengan unit teknis dan instansi lain.	Kerja sama belum dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan.

Tabel 1.13 Analisis Peluang dan Ancaman

Aspek	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Lingkungan Strategis	Peningkatan kebutuhan pengembangan karakter SDM transportasi.	Perubahan kebijakan nasional yang cepat dan dinamis.
Teknologi	Perkembangan teknologi pembelajaran daring dan digital.	Kesenjangan literasi digital peserta dan pengajar.
Kebijakan Anggaran	Peluang optimalisasi pendanaan melalui PNPB dan kerja sama.	Keterbatasan dan fluktuasi anggaran pemerintah.
Stakeholder	Meningkatnya kesadaran stakeholder terhadap pentingnya karakter SDM.	Kurangnya sinergi dan koordinasi lintas unit.
Perubahan Global	Tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.	Dampak ketidakpastian global terhadap prioritas anggaran.

1. Strategi SO (*Strength–Opportunities*)

(Memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang)

- Mengoptimalkan peran kelembagaan BP3KSDMT sebagai UPT BPSDM Perhubungan untuk memperluas cakupan pelatihan pengembangan karakter SDM transportasi.
- Mengembangkan program dan kurikulum pelatihan karakter yang selaras dengan kebutuhan stakeholder dan kebijakan pembangunan SDM nasional.
- Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk meningkatkan jumlah dan kualitas pelatihan, termasuk penerapan pembelajaran *blended learning*.
- Memperluas kerja sama dengan unit teknis, instansi pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk pengayaan materi dan metode pelatihan.
- Mendorong pemanfaatan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan akses dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan.

2. Strategi WO (*Weakness–Opportunities*)

(Memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan)

- Meningkatkan kompetensi dan jumlah widyaiswara melalui pelatihan, sertifikasi, dan kerja sama dengan lembaga pengembangan SDM.
- Mengembangkan dan memperbarui kurikulum agar lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta dan perkembangan lingkungan strategis.
- Memanfaatkan dukungan kebijakan dan teknologi untuk memperkuat sistem pembelajaran digital.
- Mengoptimalkan peluang kerja sama guna mendukung keterbatasan sarana, prasarana, dan SDM.
- Memperbaiki tata kelola dan standarisasi proses penyelenggaraan pelatihan secara bertahap.

3. Strategi ST (*Strength–Threats*)

(Memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman)

- Memperkuat kualitas program pelatihan karakter agar tetap relevan di tengah perubahan kebijakan dan dinamika global.
- Menggunakan pengalaman dan kompetensi SDM untuk menjaga kesinambungan pelatihan meskipun terjadi keterbatasan anggaran.
- Mengoptimalkan fasilitas yang ada secara efisien untuk mengurangi dampak fluktuasi pendanaan.
- Memperkuat koordinasi dengan stakeholder untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan pelatihan.
- Menjaga kualitas layanan pelatihan agar tetap memenuhi standar meskipun menghadapi tantangan eksternal.

4. Strategi WT (*Weakness–Threats*)

(Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman)

- Melakukan penyesuaian skala prioritas program pelatihan sesuai dengan ketersediaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pelatihan melalui pemanfaatan metode daring dan *blended learning*.
- Memperkuat sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi untuk mengantisipasi perubahan kebijakan dan anggaran.

- Mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah dengan mengoptimalkan potensi PNBPN dan kerja sama.
- Menyusun langkah mitigasi risiko terhadap perubahan lingkungan strategis dan keterbatasan sumber daya.

1.5 Manajemen Risiko BP3KSDMT

Manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tata kelola BP3KSDMT dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis. Penerapan manajemen risiko dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KSDMT sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan BPSDM Perhubungan.

Penerapan manajemen risiko di BP3KSDMT bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, meminimalkan dampak risiko terhadap pencapaian kinerja, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. Dengan manajemen risiko yang baik, potensi hambatan dalam pelaksanaan program pengembangan karakter SDM transportasi dapat diantisipasi sejak dini.

Ruang lingkup manajemen risiko BP3KSDMT mencakup risiko strategis, operasional, keuangan, kepatuhan, dan reputasi. Risiko strategis berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, risiko operasional berkaitan dengan proses kerja, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung. Risiko keuangan berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan penyerapan dana, sedangkan risiko kepatuhan berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun risiko reputasi berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap layanan yang diberikan BP3KSDMT.

Penerapan manajemen risiko di BP3KSDMT dilaksanakan melalui tahapan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko yang terintegrasi dengan proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Setiap risiko yang teridentifikasi dianalisis berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan

besarnya dampak terhadap pencapaian kinerja, untuk selanjutnya ditetapkan langkah pengendalian yang sesuai.

Pengendalian risiko dilakukan melalui penyelarasan program pelatihan dengan kebijakan dan kebutuhan pemangku kepentingan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana, penguatan perencanaan dan pengendalian anggaran, serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, peningkatan kualitas layanan dan evaluasi secara berkelanjutan juga dilakukan untuk menjaga reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan manajemen risiko di BP3KSDMT melibatkan pimpinan, tim manajemen risiko, serta penanggung jawab program dan kegiatan. Pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dan efektivitas pengendaliannya dilakukan secara berkala sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program ke depan. Dengan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dan berkelanjutan, BP3KSDMT diharapkan mampu mengelola potensi risiko secara efektif serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategi. Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			TINGKAT DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
TINGKAT FREKUENSI	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

Gambar 1.2 Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Implementasi Manajemen Risiko di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (BP3KSDMT) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan mitigasi risiko terhadap

peristiwa yang berpotensi terjadi. Dokumen ini bersifat *mandatory* dan menjadi acuan dalam proses identifikasi, analisis, pemetaan, serta pengendalian risiko, baik dari aspek dampak maupun tingkat kemungkinan terjadinya, sesuai dengan peta Sub proses Level 2 dan peta lintas fungsi pada kelompok proses pendukung dan sumber daya di lingkungan Kementerian Perhubungan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

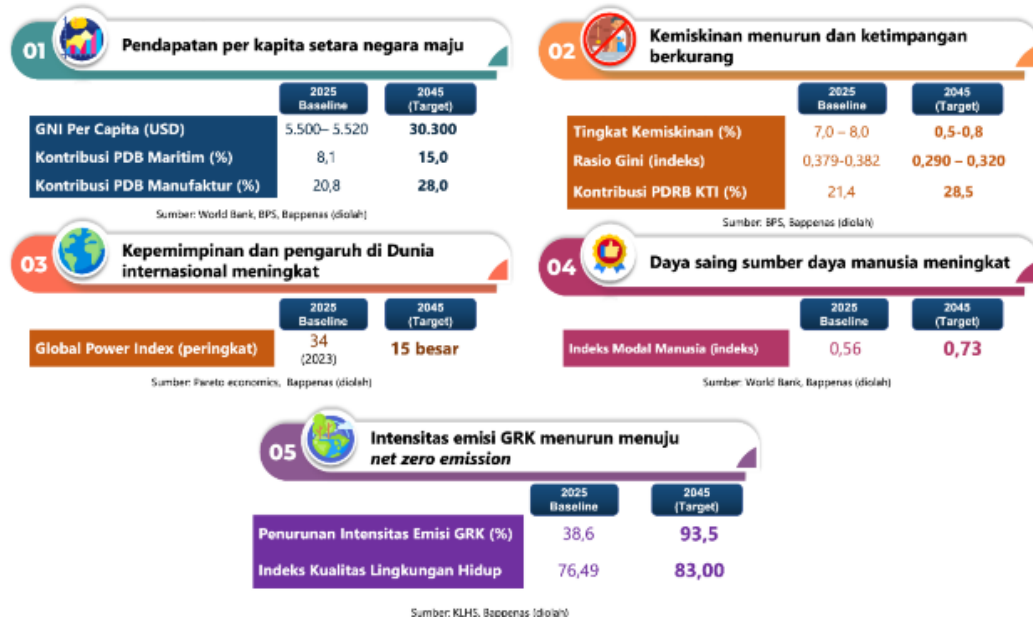
2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Penjelasan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Bersatu: Indonesia yang memiliki keragaman budaya, Bahasa, dan istiadat yang akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika yang lebih kokoh.
- b. Berdaulat: Indonesia yang berdaulat adalah sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya.
- c. Maju: Indonesia sebagai negara maju yang ekonominya mencapai posisi lima terbesar di dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, Tangguh, inovatif dan adil.
- d. Berkelanjutan: sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi, seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik.

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dimaksud memiliki sasaran utama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki Pendapatan Perkapita setara dengan negara – negara maju yang disertai oleh tingkat kemiskinan yang menurun serta ketimpangan yang berkurang, negara yang berdaulat dan

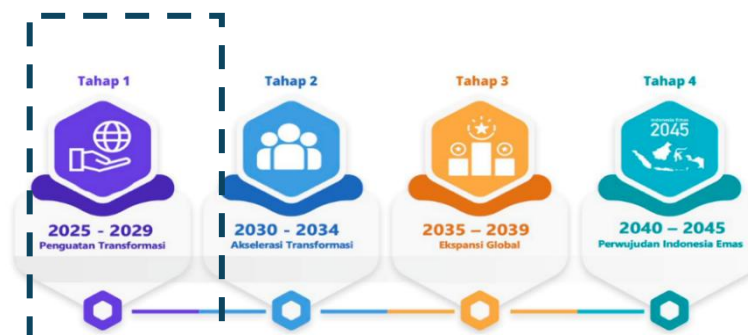
berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul serta negara yang berkomitmen untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun rincian dari sasaran utama visi Indonesia Emas 2045 adalah sebagai berikut:



Sumber: UU 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar 2.1 Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

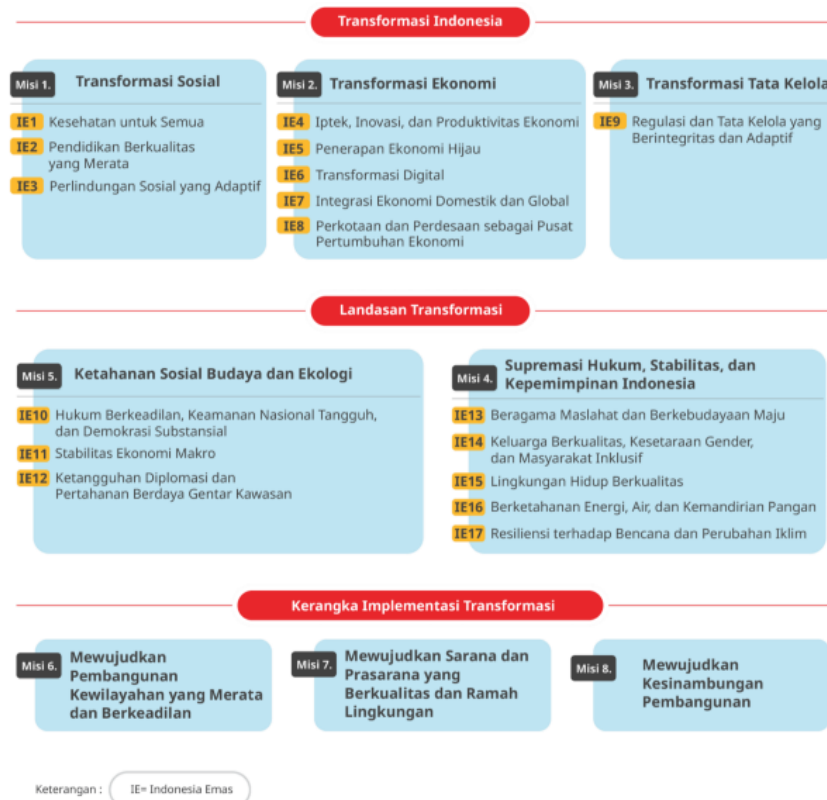
Dalam rangka mencapai Visi Indonesia Emas 2045 serta dalam rangka penyusunan fokus pembangunan berdasarkan Dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, telah disusun 4 (Empat) tahapan pembangunan yang akan didetailkan melalui RPJMN. Adapun pentahapan pembangunan sebagai implementasi RPJP Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: UU 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar 2.2 Pentahapan Implementasi RPJP Nasional Tahun 2025-2045

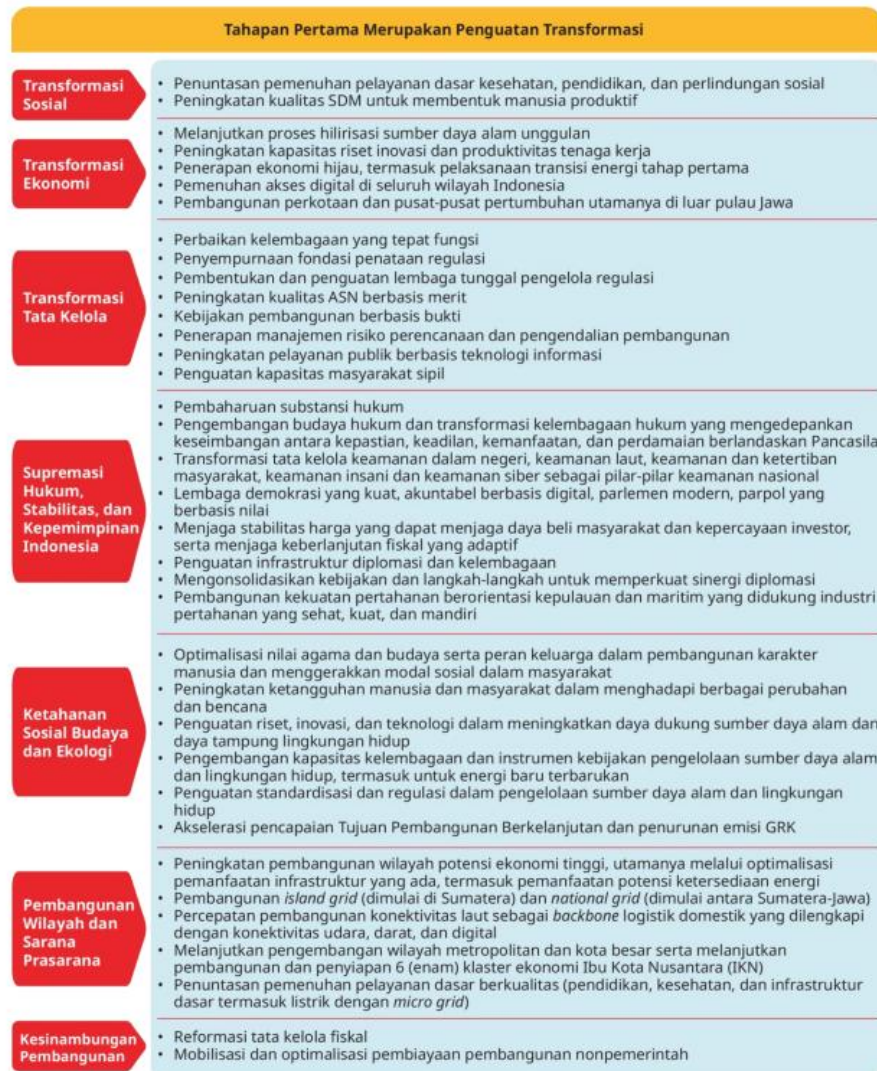
Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 diperlukan strategi besar yang telah diuraikan ke dalam 8 (Delapan) misi agenda pembangunan yang selanjutnya diturunkan kembali menjadi 17 (Tujuh Belas) arah pembangunan. Adapun 8 (Delapan) misi agenda pembangunan yang selanjutnya diturunkan kembali menjadi 17 (Tujuh Belas) ditampilkan pada gambar dibawah ini:



Sumber: Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN – Lampiran I

Gambar 2.3 Strategi Besar Mencapai Indonesia Emas 2045

Dalam implementasi RPJPN Tahun 2025-2045 telah disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah dirumuskan upaya – upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Adapun fokus arah kebijakan RPJPN 2025-2045 Tahap I dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN – Lampiran I

Gambar 2.4 Fokus Arah Kebijakan Tahun 2025-2045 Tahap I

2.2 Visi dan Misi Presiden 2025-2029

Visi Presiden terpilih tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan Indonesia memerlukan kerja sama seluruh Putra – Putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Untuk mendukung tercapainya keberhasilan dari Visi Presiden Tahun 2025-2029 tersebut, telah ditetapkan 8 (delapan) Misi Presiden (Asta Cita), yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat dan terukur telah disusun program program prioritas presiden yang memuat 17 (Tujuh Belas) Prioritas yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sector serta langkah – langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Adapun 17 Program Prioritas Presiden dan Program Hasil terbaik Cepat/*Quick Wins* ditampilkan pada gambar dibawah ini:

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2 Penyempurnaan Sistem Pemerintahan Negara	2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5 Pemberantasan Kemiskinan	5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	8 Mendirikan Badan Pemerintahan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
10 Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya	
15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	
16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah	
17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

Sumber: Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN – Lampiran

Gambar 2.5 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*)

Sebagai implementasi dari Asta Cita yang merupakan misi Presiden 2025-2029 telah disusun Prioritas Nasional yang mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029, Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lrmbaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti

halnya proyek strategis nasional. Adapun Prioritas Nasional 2025-2029 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN – Lampiran
Gambar 2.6 Asta Cita Sebagai Prioritas Pembangunan

2.3. Visi dan Misi Kementerian Perhubungan

Berdasarkan definisi, Visi (sesuai pasal 1 UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN) adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam konteks ini, keadaan yang diinginkan adalah kondisi transportasi nasional sesuai lingkup tugas dari Kementerian Perhubungan dalam Perpres No 173 Tahun 2024, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Ini mencakup penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi. Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 diturunkan (cascaded) dari Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang di dalam dokumen RPJPN 2025-2045 (UU 59/2024). Sesuai dengan pedoman dalam Permen PPN/Bappenas No.10 Tahun 2023, visi Kementerian/Lembaga dalam Renstra juga diturunkan dari visi Presiden yang tertuang dalam dokumen RPJMN (Perpres 12/2025). Untuk

mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Presiden 2025-2029 pada sektor transportasi, dirumuskan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 adalah **“Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 merupakan bentuk dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pencapaian visi pembangunan nasional sesuai lingkup tugas dan fungsi dalam Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang mencakup penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi. Dalam visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 terkandung arti kondisi transportasi nasional yang ingin diwujudkan adalah Transportasi Indonesia yang maju dengan karakteristik jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, dengan pemahaman kata kunci sebagai berikut:

- a. Handal: tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. Inklusif: tersedianya layanan transportasi yang adil dan merata serta dapat diakses oleh semua golongan masyarakat.
- c. Berdaya saing: tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing global.
- d. Memberikan nilai tambah: penyelenggaraan perhubungan mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional disegala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Misi Kementerian Perhubungan dirumuskan dengan menggunakan metode penurunan/cascading adopsi langsung dari misi Pembangunan Nasional yang dicantumkan dalam dokumen RPJPN Tahun 2025-2045 (UU 59/2024) dan

RPJMN (Perpres 12/2025). Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan dukungan bidang transportasi terhadap Visi Presiden 2025-2029 dan Visi Indonesia 2045. Dalam hal ini ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Misi Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 yang berkesesuaian secara langsung dengan 8 (delapan) Misi Presiden 2025-2029 (Asta Cita), yakni:

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan.
2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman.
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan.
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor-sektor ekonomi utama.
6. Membangun transportasi kewilayahan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau.
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional.
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian Perhubungan untuk Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029.
2. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing.
3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas.

4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Perhubungan yang berintegritas dan adaptif.

Perumusan tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029 dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard (BSC)* di mana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing perspektif. Adapun penjelasannya:

1. Tujuan 1. “Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029” adalah tujuan pada Level *Stakeholders Perspectives (SP)* yang merupakan *Externalities* Kementerian Perhubungan, yaitu berkaitan dengan perwujudan Visi Kementerian Perhubungan yang diharapkan memberikan nilai tambah/dukungan terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) yang merupakan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029.
2. Tujuan 2 “Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing” merupakan tujuan pada Level *Customer Perspectives (CP)* yang merupakan *Core Business* Kementerian Perhubungan, yaitu berkaitan dengan penyediaan layanan publik di bidang transportasi yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan yang handal, inklusif, dan berdaya saing.
3. Tujuan 3 “Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas” merupakan tujuan pada Level *Internal Business Process Perspectives (IBP)* yang merupakan *Technical Support* Kementerian Perhubungan, yaitu berkaitan dengan bisnis proses dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan transportasi yang berkualitas yakni cepat, akurat, dan manfaat yang didukung oleh pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan dioperasionalkan oleh SDM transportasi yang kompeten.
4. Tujuan 4 “Terwujudnya tata kelola Kementerian Perhubungan yang berintegritas dan adaptif” merupakan tujuan pada *Level Learning and Growth Perspectives (LG)* yang merupakan *Management Support* Kementerian Perhubungan, yaitu berkaitan dengan tata kelola Kementerian Perhubungan yang baik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan *good and clean governance* di lingkungan Kementerian Perhubungan

Tabel 2.1 Konsep Visi Misi Kementerian Perhubungan

MISI BERNEGARA INDONESIA	MISI INDONESIA EMAS 2025-2029	MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2025-2029	MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029
(Pembukaan UUD 1945)	(UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045)	(Perpres Nomor 12 Tahun tentang RPJMN 2025-2029)	(PM No... Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029)
<ol style="list-style-type: none"> Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 	<p>8 Misi (Agenda) Pembangunan</p> <p>A. Transformasi Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> Transformasi Sosial Transformasi Ekonomi Transformasi Tata Kelola <p>B. Landasan Transformasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi <p>C. Kerangka Implementasi Transformasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan Kewilayahan 	<p>8 Misi Asta Cita</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk 	<p>8 Misi Renstra Kementerian Perhubungan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara sistematis Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama
	<p>yang Merata dan Berkeadilan</p> <ol style="list-style-type: none"> Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan Kesinambungan Pembangunan 	<p>meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur 	<ol style="list-style-type: none"> Membangun transportasi perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim

Sumber: Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029, 29 April 2025

Tabel 2.2 Struktur Muatan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan

1 Visi Kemenhub 2025-2029	Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045						
8 Misi Kemenhub 2025-2029	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan 2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman 4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan 5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama 6. Membangun transportasi perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau 7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional 8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan bertahanan iklim 						
4 Tujuan Kemenhub 2025-2029	T.1 Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran nasional pada RPJMN 2025-2045	T.2 Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing			T.3 Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas		T.4 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif
9 Sasaran (3 SN + 6 SS) Kemenhub 2025-2029	SN dalam RPJMN 2025-2029: • Penurunan biaya logistik (PN5)	SS1 Meningkatkan konektivitas dan integrasi transportasi nasional	SS2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi nasional	SS3 Meningkatkan keselamatan transportasi nasional	SSp4 Meningkatkan kualitas kebijakan transportasi nasional	SSp5 Meningkatkan SDM transportasi yang kompeten	SSp6 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan

7 Indikator (IKSS) Kemenhub 2025-2029	• Penurunan emisi GRK (PN2) • Peningkatan stok infrastruktur	IKSS1.1 Rasio konektivitas transportasi nasional IKSS1.2 Rasio integrasi transportasi nasional	IKSS2 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi	IKSS3 Tingkat keselamatan transportasi nasional	IKSSp4 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	IKSSp5 Indeks peningkatan SDM transportasi	IKSSp7 Indeks RB Kementerian Perhubungan
21 Arah Kebijakan Kemenhub 2025-2029	Arah kebijakan nasional (multi sektoral) dalam RPJMN 2025-2029 dalam rangka: • Penurunan biaya logistik • Penurunan emisi GRK • Peningkatan stok infrastruktur	AK.1 Peningkatan konektivitas internasional yang didukung industri transportasi berorientasi global AK.2 Peningkatan efektivitas konektivitas <i>backbone</i> antar pulau untuk mewujudkan pemerataan pembangunan AK.3 Peningkatan efisiensi sistem distribusi	AK.7 Peningkatan kualitas pelayanan angkutan publik sebagai bagian dari pelayanan dasar AK.8 Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan melalui digitalisasi AK.9 Peningkatan aksesibilitas publik terhadap	AK.11 Pemenuhan (<i>compliance</i>) standar teknis sarana dan prasarana transportasi AK.12 Peningkatan efektivitas koordinasi, pengawasan, dan pengendalian di lapangan AK.13 Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan	AK.14 Peningkatan relevansi kebijakan transportasi terhadap isu lintas sektoral (inklusivitas, gender, ibu dan anak, disabilitas, kemiskinan) AK.15 Peningkatan kualitas perumusan kebijakan transportasi AK.16 Peningkatan efektivitas pelaksanaan	AK.17 Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang <i>link and match</i> dengan kebutuhan industri, teknologi, dan pengembangan sarana prasarana transportasi AK.18 Peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber daya serta fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan	AK.20 Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi AK.21 Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkungan Kementerian Perhubungan
		<i>hinterland</i> dalam pulau untuk mengurangi biaya logistik AK.4 Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi AK.5 Pemerataan jaringan transportasi ke kawasan perdesaan dan DTPK AK.6 Peningkatan integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan transportasi	pelayanan jasa transportasi yang inklusif dan berkeadilan AK.10 Percepatan transisi energi serta penerapan transportasi ramah lingkungan dan bertahanan iklim	keselamatan transportasi	kebijakan transportasi	AK.19 Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan	

Sumber: Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029, 29 April 2025

2.4 Visi Misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Visi BPSDM Perhubungan dirumuskan sebagai langkah akhir dari proses cascading strategis yang dimulai dari Visi Indonesia Emas 2045 dan diturunkan melalui Visi Kementerian Perhubungan 2025–2029. Perumusan Visi ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi BPSDM Perhubungan yang diamanatkan untuk menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.

Mengacu pada Visi Kementerian Perhubungan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kemenhub 2025–2029, di mana salah satu karakteristik Transportasi Maju adalah berdaya saing, yang disajikan oleh sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing global, maka Visi BPSDM Perhubungan ditetapkan sebagai berikut:

“SDM Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Misi BPSDM Perhubungan merupakan penjabaran operasional dan fungsional yang secara langsung diturunkan dari Misi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun 2025–2029, khususnya Misi yang berhubungan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Mandat utama BPSDM Perhubungan adalah menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan SDM di bidang transportasi.

Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang *link and match* dengan kebutuhan industri, teknologi, dan pengembangan sarana prasarana transportasi untuk menuju Terwujudnya SDM Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045, menetapkan misi sebagai berikut:

1. **Mewujudkan SDM transportasi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan**, mencakup perwujudan SDM transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan, SDM transportasi yang mendukung terlaksananya transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim, dan SDM transportasi yang menerapkan kebijakan transportasi sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keberlanjutan.
2. **Memperkuat SDM transportasi untuk mendukung ketahanan dan Kemandirian Nasional**, mencakup penguatan SDM transportasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru, memperkuat SDM transportasi

yang mendukung konektivitas transportasi nasional dalam rangka hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama.

3. **Terbentuknya SDM Transportasi yang Mendukung Infrastruktur dan Integrasi Sistem**, mencakup SDM transportasi yang mendukung pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara sistematis, dan SDM transportasi yang mendukung pembangunan transportasi perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau.
4. **Memperkuat SDM Transportasi untuk Transformasi dan Teknologi Modern**, mencakup SDM transportasi yang melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional dan peningkatan Kualitas SDM transportasi dan kebijakan SDM transportasi sesuai perkembangan teknologi.

2.5 Visi Misi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (PPSDMAP)

Visi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan Tahun 2025-2029 diturunkan (*cascaded*) dari Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang di dalam dokumen RPJPN 2025-2045 (UU 59/2024) yang secara berjenjang diturunkan sampai dengan level Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Adapun penjabaran aspek-aspek yang terkandung dalam visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang kemudian dijadikan Visi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan adalah **“Terpenuhinya Kuantitas dan Kualitas SDM Aparatur Perhubungan yang Berintegritas dan Kompeten Untuk Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Dalam rangka pencapaian Visi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan, perlu disusun misi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan yang selanjutnya misi tersebut akan dijadikan sebagai pedoman sasaran pelaksanaan kegiatan untuk periode Tahun 2025-2029. Adapun misi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Perhubungan melalui penyelenggaraan diklat yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.**

Penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan harus melibatkan seluruh sub sektor baik pada saat persiapan melalui *Training Need Analysis* (TNA) maupun pelaksanaannya. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kompetensi bagi pegawai di Seluruh Indonesia baik Instansi pusat maupun daerah sesuai dengan prinsip berkeadilan serta peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

2. **Menyediakan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan yang memiliki kompetensi, kemandirian, serta kemampuan digital melalui pengembangan kurikulum diklat berbasis *Corporate University*.** Penyediaan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan yang memiliki kompetensi dan memiliki kemandirian diharapkan dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung konektivitas di seluruh Indonesia dalam rangka mensukseskan seluruh target program yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029. Peningkatan kemampuan digital untuk Sumber Daya Manusia Aparatur juga diharapkan dapat menjadikan Kementerian Perhubungan menjadi salah satu Kementerian yang mampu menyesuaikan diri terhadap era digital serta menjadikan digitalisasi menjadi salah satu alat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, pengembangan kurikulum diklat berbasis *Corporate University* diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan serta.
3. **Mengembangkan program Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi SDM di sektor Transportasi,** Penyusunan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam rangka meningkatkan *link and match* antara pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dengan kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

4. **Mengembangkan Sarana & Prasarana Pendidikan dan pelatihan bagi SDM Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi dalam rangka pemerataan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Aparatur Perhubungan di seluruh Indonesia**, dilaksanakan dalam rangka penguatan transformasi tata kelola pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

2.6 Visi dan Misi BP3KSDMT

A. Visi BP3KSDMT

Mengacu pada Visi Kementerian Perhubungan “Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, serta Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) dan Visi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan, yaitu “Terpenuhinya Kuantitas dan Kualitas SDM Aparatur Perhubungan yang Berintegritas dan Kompeten untuk Mendukung Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, maka Visi Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (BP3KSDMT) Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya SDM Aparatur Perhubungan yang Berintegritas, Berkarakter, dan Kompeten dalam Mendukung Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

B. Misi BP3KSDMT

Dalam rangka mewujudkan Visi Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (BP3KSDMT) Tahun 2025–2029, serta sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kementerian Perhubungan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), BP3KSDMT menetapkan Misi sebagai arah kebijakan dan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter SDM Aparatur Perhubungan, sebagai berikut:

1. **Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter SDM Aparatur Perhubungan yang terstandar, sistematis,**

dan berkelanjutan guna membentuk aparatur yang berintegritas, beretika, dan berorientasi pada pelayanan publik.

2. **Meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural SDM Aparatur Perhubungan** melalui program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan organisasi, kebijakan pembangunan nasional, serta dinamika sektor transportasi.
3. **Mengembangkan dan memperkuat kurikulum, metode pembelajaran, serta inovasi pendidikan dan pelatihan** berbasis teknologi informasi dan digitalisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas hasil pelatihan aparatur perhubungan.
4. **Memperkuat tata kelola kelembagaan, sistem pendukung, serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan** guna mewujudkan penyelenggaraan diklat pembangunan karakter yang akuntabel, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

2.7 Tujuan dan Sasaran BP3KSDMT

Perumusan tujuan dan sasaran (berikut dengan indikator kinerjanya) BPSDM Perhubungan 2025-2029 berbasis pada pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti yang digunakan pada level Kementerian Perhubungan, yang terdiri dari 4 perspektif, yakni:

1. *Stakeholders Perspective* (SP), yang merepresentasikan pencapaian sasaran dampak/manfaat (*impact/benefit*) yang diinginkan oleh pemangku kepentingan (utamanya adalah publik yang dimandatkan kepada Pemerintah) dari program pengembangan SDM di bidang Transportasi yang dilaksanakan oleh BPSDM Perhubungan. Dalam konteks transportasi sebagai kebutuhan turunan (*derived demand*), maka dampak/manfaat yang diharapkan adalah dukungannya (dalam bentuk konektivitas transportasi yang efektif dan efisien) terhadap semua sektor pembangunan nasional (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan);
2. *Customer Perspective* (CP), yang menggambarkan pencapaian sasaran hasil (*outcome*) berupa layanan transportasi darat pada tingkat yang dibutuhkan pengguna (*user*) dalam hal ketersediaan (*existence/accessibility and capacity*), pelayanan (*time, cost, quality, punctuality, etc*), serta

keselamatan dan keamanan (*safety and security*). Kualitas layanan transportasi darat yang baik akan menjadi penentu efisiensi dan efektivitas dari capaian manfaat/dampak yang diinginkan pada level *Stakeholders Perspective* (SP);

3. *Internal Business Perspective* (IBP), yang mewakili mengenai bagaimana proses kerja (*business process*) yang dilakukan oleh unit kerja/jajaran di lingkungan BPSDM Perhubungan dalam rangka pengembangan SDM di bidang Transportasi yang sesuai harapan/kebutuhan pengguna (*customer perspective/CP*) dan berdampak baik dalam mendukung sektor-sektor pembangunan nasional lainnya (*stakeholders perspective/SP*). Proses kerja ini tidak terlepas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPSDM Perhubungan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2025, dimana cakupannya setidaknya terdiri dari (1) Penyusunan Kebijakan Teknis, (2) Pelaksanaan Pengembangan SDM Transportasi, (3) Pelaksanaan Pemantauan, Analisis, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan, (4) Pelaksanaan Administrasi Badan (5) Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Menteri. Secara teoretik, dalam teori manajemen kinerja, IBP menggambarkan tentang bagaimana fungsi manajemen (*POAC/planning, organizing, actuating, and controlling*) dilakukan oleh BPSDM Perhubungan dalam mengelola dan menyelenggarakan bidang pengembangan SDM di bidang Transportasi.
4. *Learning and Growth Perspective* (LGP), yang menerangkan tentang bagaimana upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan modal dasar (*basic capital*) organisasi agar dapat menjalankan bisnis proses (tugas dan fungsi) secara paripurna. Mengacu pada teori manajemen kinerja, modal dasar suatu organisasi untuk melaksanakan bisnis (tugas dan fungsinya) disebut sebagai sarana manajemen 5M1I (*Man, Money, Machine, Method, Material, and Information*).

Dengan memperhatikan konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dan prinsip manajemen kinerja tersebut di atas, maka struktur peta strategi BPSDM Perhubungan sesuai dengan nomenklatur tujuan, sasaran, dan indikator kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diatur dalam PM No 85 Tahun 2020 Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, maka digunakan beberapa istilah, yakni: TS (Tujuan Strategis) yakni tujuan sebagai penjabaran Visi K/L yang dilengkapi dengan rencana sasaran nasional/Sasaran Strategis (SS) yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (dalam mendukung sektor ekonomi di segala bidang). Dalam hal ini, TS (Tujuan Strategis) merupakan tujuan untuk *Stakeholders Perspectives/SP* yang menjadi concern dari Presiden dan yang ditugaskan kepada Menteri untuk melaksanakannya.

A. Tujuan

Tujuan BPSDM Perhubungan dalam renstra periode tahun 2025-2029 dirumuskan dalam 3 (Tiga) butir tujuan yang merepresentasikan pencapaian visi BPSDM Perhubungan periode tahun 2020-2024 SDM Transportasi yang maju, mandiri, kompeten, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Tujuan BPSDM Perhubungan ini meliputi:

Tabel 2.4 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BPSDMP

Tujuan BPSDMP	Indikator Kinerja Tujuan	Ket
T.1 Terwujudnya SDM transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing.	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	%
T.2 Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Program Studi, Jenis Pelatihan, Pelayanan, Penelitian dan Penyerapan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi	%
T.3 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola yang Baik di BPSDM Perhubungan	%

Adapun Tujuan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi yang diturunkan dari Tujuan Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah T1 yaitu Terwujudnya SDM Aparatur Perhubungan yang berintegritas, berkarakter, dan kompeten melalui pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter yang berkualitas dan berkelanjutan. (Selaras dengan T.1 BPSDMP: pemenuhan SDM transportasi yang kompeten).

B. Sasaran

1. Sasaran Program/Kegiatan

Perumusan sasaran program Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (BP3KSDMT) didasarkan pada hasil penurunan sasaran strategis dan sasaran strategis program Kementerian Perhubungan serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan memperhatikan hasil analisis terhadap tugas pokok dan fungsi BP3KSDMT. Berdasarkan hal tersebut, Sasaran Program/Kegiatan BP3KSDMT adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Sasaran Program/Kegiatan BP3KSDMT

Tujuan	Sasaran Program/Kegiatan
T.1 Terwujudnya SDM transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing.	SK 8. Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan
	SK 9. Terwujudnya Organisasi yang Agile dan Sumber Daya Manusia Unggul
	SK 10. Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi pada Layanan Prima
	SK 12. Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

2. Indikator Kinerja Kegiatan/Program

Indikator Kinerja Program/Kegiatan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai capaian hasil (outcome) dari suatu sasaran program/kegiatan. Indikator Kinerja Program/Kegiatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (BP3KSDMT) disusun sebagai dasar pemantauan, pengukuran, dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun Indikator Kinerja Program/Kegiatan BP3KSDMT adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Program/Kegiatan BP3KSDMT

Tujuan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Ket
T.1 Terwujudnya SDM transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing.	SK 8. Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan	IKK 20. Persentase Peserta Pelatihan Aparatur	%
	SK 9. Terwujudnya Organisasi yang Agile dan Sumber Daya Manusia Unggul	IKK 22. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (IPASN)	Indeks
	SK 10. Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKK 24. Persentase Pemenuhan Akuntabilitas di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	%
		IKK 25. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai
		IKK 26. Nilai SAKIP	Nilai

Tujuan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Ket
	SK 12. Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	IKK 28. Persentase Pelaksanaan Kerja Sama dan Kemitraan	%

3. Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kementerian Perhubungan dan Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (BP3KSDMT) menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2025–2029 yang diarahkan untuk mewujudkan Aparatur Perhubungan yang berkarakter, berintegritas, dan profesional. Penetapan sasaran strategis ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi eksisting BP3KSDMT, mandat kelembagaan, serta kebutuhan pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sasaran Strategis BP3KSDMT difokuskan pada penguatan sistem, peran kelembagaan, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter aparatur sebagai fondasi pembentukan budaya kerja aparatur yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik. Berikut uraian Sasaran Strategis BP3KSDMT Tahun 2025-2029:

1. Terwujudnya Sistem Pengembangan Karakter Aparatur Perhubungan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.

Sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan tersedianya sistem pengembangan karakter Aparatur Perhubungan yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Sistem tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan pengembangan SDM Aparatur Perhubungan. Melalui sasaran ini, BP3KSDMT berperan sebagai penggerak utama dalam pembentukan nilai, sikap, dan perilaku aparatur yang berintegritas dan beretika.

2. Terwujudnya Peran BP3KSDMT dalam Implementasi *Corporate University* Aparatur Perhubungan.

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat peran BP3KSDMT sebagai bagian dari ekosistem *Corporate University* Aparatur Perhubungan. BP3KSDMT mendukung pembelajaran organisasi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter, pengelolaan pengetahuan, serta integrasi nilai-nilai organisasi dalam proses pembelajaran aparatur. Dengan demikian, pengembangan karakter aparatur menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembelajaran berkelanjutan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. Terwujudnya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Aparatur Perhubungan yang Berwawasan Lingkungan (*Green Campus*).

Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter Aparatur Perhubungan yang menerapkan prinsip keberlanjutan lingkungan. Penerapan konsep *green campus* dilakukan melalui pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, pemanfaatan teknologi secara efisien, serta pembentukan budaya kerja aparatur yang peduli terhadap lingkungan. Sasaran ini sejalan dengan komitmen Kementerian Perhubungan terhadap pembangunan berkelanjutan.

4. Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Aparatur yang Akuntabel dan Berkinerja.

Sasaran ini diarahkan pada terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter Aparatur Perhubungan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Tata kelola yang baik mencakup perencanaan yang berbasis kinerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Melalui sasaran ini, BP3KSDMT diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan

dan pelatihan yang berkualitas serta mendukung pencapaian kinerja organisasi.

5. Terwujudnya Aparatur Perhubungan yang Berkarakter, Berintegritas, dan Profesional.

Sasaran ini merupakan sasaran dampak (outcome) yang mencerminkan hasil dari keseluruhan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter oleh BP3KSDMT. Aparatur Perhubungan yang berkarakter, berintegritas, dan profesional diharapkan mampu mendukung terwujudnya birokrasi yang efektif, bersih, dan melayani, serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat.

2.8 Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan BP3KSDMT

Dalam rangka memastikan pencapaian Sasaran Kegiatan BP3KSDMT secara optimal, diperlukan identifikasi dan pengelolaan risiko yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Oleh karena itu, setelah penjabaran Sasaran Kegiatan, selanjutnya disajikan pembahasan manajemen risiko yang bertujuan untuk mengantisipasi potensi hambatan serta menetapkan langkah pengendalian risiko guna mendukung pencapaian target kinerja. Berikut merupakan uraian Manajemen Risiko pada setiap sasaran kegiatan:

- **Manajemen Risiko pada Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan.**

Dalam pelaksanaan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, BP3KSDMT menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian target pengembangan kompetensi aparatur. Risiko tersebut antara lain ketidaktercapaian target peserta pelatihan, ketidaksesuaian program pelatihan dengan kebutuhan organisasi, serta keterbatasan sumber daya pendukung. Pengendalian risiko dilakukan melalui perencanaan pengembangan kompetensi berbasis analisis kebutuhan, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program yang dilaksanakan.

- **Manajemen Risiko pada Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Organisasi yang Agile dan SDM Unggul.**

Pada Sasaran Kegiatan Terwujudnya Organisasi yang Agile dan SDM Unggul, risiko yang dihadapi meliputi rendahnya kemampuan adaptasi organisasi terhadap perubahan, keterbatasan kompetensi SDM, serta belum optimalnya penerapan sistem manajemen kinerja. Upaya pengendalian risiko dilaksanakan melalui penguatan tata kelola organisasi, pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan, serta penerapan sistem penilaian kinerja yang objektif dan akuntabel.

- **Manajemen Risiko pada Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi pada Layanan Prima.**

Pencapaian Sasaran Kegiatan Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi pada Layanan Prima menghadapi risiko terkait kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, pengelolaan anggaran, serta kualitas layanan administrasi dan umum. Pengendalian risiko dilakukan melalui penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, serta perbaikan berkelanjutan terhadap standar pelayanan.

- **Manajemen Risiko pada Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BP3KSDMT.**

Dalam mendukung Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BP3KSDMT, risiko yang dihadapi antara lain rendahnya efektivitas pelaksanaan kerjasama, kurang optimalnya koordinasi dengan mitra, serta pemanfaatan hasil kerjasama yang belum maksimal. Pengendalian risiko dilakukan melalui perencanaan kerjasama yang terarah, penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerjasama dan kemitraan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.1.1 Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, pembangunan sektor transportasi diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan pembangunan transportasi disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing pulau utama di Indonesia sebagai berikut.

a. Pulau Jawa

Pembangunan transportasi di Pulau Jawa difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kualitas layanan transportasi guna mengatasi kepadatan lalu lintas dan mendukung mobilitas ekonomi nasional. Arah kebijakan meliputi pengembangan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk jalan tol, jalan nasional, serta pembangunan flyover dan underpass di kawasan metropolitan. Selain itu, dilakukan perluasan dan peningkatan kualitas transportasi massal perkotaan seperti MRT, LRT, dan BRT, serta modernisasi pelabuhan dan bandara utama untuk mendukung efisiensi logistik, pertumbuhan ekonomi, dan pariwisata.

b. Pulau Sumatera

Pembangunan transportasi di Pulau Sumatera diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarprovinsi dan mendukung pengembangan wilayah barat Indonesia. Kebijakan meliputi pembangunan dan peningkatan jalan lintas Sumatera serta jembatan strategis guna memperlancar pergerakan barang dan orang. Selain itu, pengembangan transportasi laut dan sungai dilakukan melalui peningkatan fasilitas pelabuhan utama dan jalur transportasi sungai. Modernisasi dan peningkatan kapasitas

bandara juga menjadi prioritas untuk meningkatkan konektivitas udara dan mendukung sektor pariwisata.

c. Pulau Kalimantan

Pembangunan transportasi di Kalimantan difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah dan dukungan terhadap pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk kawasan Ibu Kota Nusantara. Arah kebijakan mencakup pembangunan dan peningkatan jalan trans-Kalimantan, pengembangan jembatan strategis, peningkatan kapasitas dan kualitas pelabuhan utama serta pelabuhan kecil, dan peningkatan fasilitas bandara di kota-kota utama untuk mendukung konektivitas udara dan distribusi logistik.

d. Pulau Sulawesi

Arah pembangunan transportasi di Sulawesi ditujukan untuk memperkuat keterhubungan antarwilayah dan meningkatkan aksesibilitas kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil. Kebijakan meliputi pembangunan dan peningkatan jalan trans-Sulawesi, pembangunan jembatan strategis, pengembangan pelabuhan utama dan jalur transportasi laut, serta modernisasi dan peningkatan kapasitas bandara guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.

e. Bali dan Nusa Tenggara

Pembangunan transportasi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara diarahkan untuk mendukung pariwisata dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Fokus kebijakan meliputi pembangunan dan peningkatan jalan lintas pulau, pengembangan jembatan dan infrastruktur pendukung konektivitas pulau-pulau kecil, serta peningkatan dan modernisasi pelabuhan dan bandara utama guna mendukung mobilitas wisatawan dan distribusi barang.

f. Papua dan Maluku

Pembangunan transportasi di Papua dan Maluku difokuskan pada peningkatan aksesibilitas wilayah terpencil dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Arah kebijakan mencakup

pembangunan dan peningkatan jalan trans-Papua, pembangunan jembatan strategis, pengembangan pelabuhan utama dan pelabuhan kecil, serta peningkatan kapasitas dan fasilitas bandara untuk mendukung konektivitas udara, distribusi logistik, dan pengembangan ekonomi lokal.

Arah pembangunan transportasi dalam RPJMN 2025-2029 berfokus pada penguatan konektivitas antarwilayah, peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di setiap pulau utama. Upaya ini mencakup pengembangan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi massal untuk memastikan keterhubungan yang lebih baik, efisiensi logistik, dan peningkatan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan transportasi termaktub dalam pembangunan wilayah dalam mendukung pencapaian visi-misi program prioritas, dan PHTC yang dijelaskan pada Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN – Lampiran I



Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN – Lampiran I

Gambar 3.1 Peran Pembangunan Wilayah dalam Mendukung Pencapaian Visi Misi Program Prioritas

Peran pembangunan ini dituangkan dalam penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah, yang terdiri dari 14 arah kebijakan umum untuk setiap wilayah. Berikut merupakan ekosistem percepatan pembangunan daerah yang dijelaskan pada Lampiran I Perpres 12/2025.

- a. Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua hierarki (Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang dengan sistem OSS, serta pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Penataan otonomi daerah yang mewujudkan harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah, kebijakan kerja sama antar multiaktor; peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah. Selain itu, diperlukan penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah).
- c. Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik, didukung dengan penguatan tata kelola untuk meningkatkan akses dan pemanfaatannya serta pengembangan sumber daya manusia bidang informasi geospasial.
- d. Penguatan fondasi keuangan daerah melalui optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pendanaan alternatif di daerah.
- e. Percepatan pelaksanaan reforma agraria, sertifikasi tanah menuju sistem pendaftaran tanah publikasi/stelsel positif, dan percepatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital.
- f. Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun termasuk pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- g. Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
- h. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi.
- i. Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, termasuk generasi milenial dan generasi Z.

- j. Pemenuhan kebutuhan listrik dan transisi energi listrik yang rendah karbon, serta penguatan infrastruktur digital.
- k. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi.
- l. Pengembangan konektivitas pendukung layanan dasar serta pemenuhan keselamatan dan keamanan transportasi termasuk peningkatan SDM Transportasi.
- m. Pemantapan fondasi keberlanjutan dan produktivitas sumber daya air.
- n. Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu
- o. kesejahteraan, peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif, dan peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif.

Salah satu ekosistem percepatan pembangunan daerah adalah peningkatan SDM Transportasi. Pengembangan SDM Transportasi lebih didetailkan pada indikasi program prioritas nasional.

Tabel 3.1 Indikasi Program Prioritas Nasional terkait BPSDM

No.	Indikator	Satuan	Capaian	Target (2025)	Target (2029)	K/L Pengampu
03.01.07	Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM transportasi yang berdaya saing					
	01 – Tingkat lulusan SDM transportas yang bersertifikat kompetensi	%	92 (2023)	92	94	Kemenhub
	02 – Tingkat penyerapan lulusan pembentukan SDM Transportasi	%	85,1 (2023)	70	70	Kemenhub
03.01.07.01	PRO-P: Pengembangan Pendidikan Vokasi SDM Transportasi					
03.01.07.02	PRO-P: Pemenuhan Infrastruktur Penunjang SDM Transportasi					
03.01.07.03	PRO-P: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Transportasi					
03.01.07.024	PRO-P: Peningkatan Tata Kelola					

No.	Indikator	Satuan	Capaian	Target (2025)	Target (2029)	K/L Pengampu
	Pengembangan SDM Transportasi					

3.1.2 Arah Kebijakan Kementerian Perhubungan 2025-2029

Secara lebih spesifik struktur Arah Kebijakan (AK) untuk mencapai setiap Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029. Arah Kebijakan (AK) tersebut tidak terlepas dari Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Transportasi dan Prioritas Pembangunan Nasional sesuai Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Terdapat 21 (dua puluh satu) Arah Kebijakan (AK) untuk mencapai masing-masing Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan untuk periode 2025-2029. Arah Kebijakan (AK) ini merupakan penjabaran dari fokus Kementerian Perhubungan yang mencakup efektivitas dampak terhadap dukungan pencapaian Sasaran Nasional (SN) RPJMN 2025-2029, pencapaian kinerja pelayanan publik yang menjadi *core-business* Kementerian Perhubungan, *focusing* dukungan pada lokasi/sektor pembangunan utama dalam RPJMN 2025-2029, serta penyediaan sumberdaya dan tata kelola bidang transportasi yang memadai.

1. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 1 (SS1) Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional, yaitu:
 - a. Arah Kebijakan 1 (AK1) Arah kebijakan peningkatan konektivitas internasional untuk mendukung daya saing ekonomi dan kedaulatan nasional, antara lain dilakukan melalui:
 - Meningkatkan standar teknis dan pelayanan *Pelabuhan Hub Internasional* (PHI) Kuala Tanjung, Tanjung Priok dan Bitung sesuai perkembangan kebutuhan pelayaran internasional.
 - Mengembangkan konektivitas terhadap jaringan utama internasional (*international core route*).

- Memperkuat konektivitas terhadap jaringan penerbangan internasional pada bandara internasional.
 - Mendorong pelaku nasional menjadi pemain global melalui pembentukan Aliansi strategis pada jaringan pelabuhan, pelayaran, bandara, dan penerbangan global.
 - Penguatan peran OP sebagai Pengelola Kawasan Pelabuhan Utama dan sekitarnya.
- b. Arah Kebijakan 2 (AK2) Peningkatan efektivitas konektivitas *backbone* antar pulau untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, antara lain dilakukan melalui:
- Mengharmonisasikan standar teknis dan integrasi pelayanan pada jaringan pelabuhan utama (*Integrated Port Network*).
 - Mengembangkan Simpul Distribusi Utama Baru Nasional (Superhub IKN, Pelabuhan/Bandara Hub).
 - Menata kembali jaringan pelayaran nasional sesuai konsep pendulum nusantara yang berpola loop.
 - Mengintegrasikan sistem jaringan perintis angkutan laut, darat, dan udara untuk menjamin pemerataan konektivitas ke seluruh wilayah NKRI.
 - Optimalisasi sistem *direct-line* (tol laut dan pendukungnya: jembatan udara, *long distance ferry*, subsidi angkutan barang) untuk menurunkan biaya logistik barang pokok dan penting ke DTPK.
 - Pengembangan *Hub Port*/Simpul Transshipment di Indonesia Timur (termasuk peningkatan standar teknis dan penyediaan fasilitas PU di KTI).
 - Penyusunan Perpres tentang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pelabuhan sebagai Simpul Logistik.

- Dukungan konektivitas nasional dan global IKN melalui pelabuhan dan/atau bandara pendukung.
- c. Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan efisiensi sistem distribusi *hinterland* dalam pulau untuk mengurangi biaya logistik, antara lain dilakukan melalui:
- Mengembangkan jaringan logistik pulau besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua) yang menghubungkan secara efektif antar pusat kegiatan, pusat produksi, dan simpul transportasi.
 - Revitalisasi sistem perusahaan angkutan umum penumpang dan barang moda jalan.
 - Menuntaskan pengintegrasian jaringan jalur kereta api Trans Sumatera.
 - Mengembangkan akses jalur kereta api dan/atau akses jalan Kelas I dari Kawasan Industri, Kawasan Tambang, dan Kawasan Pertanian berskala Besar.
 - Optimalisasi pemanfaatan kereta api Pulau Jawa untuk logistik barang khusus (semen, batu dan pasir, batu bara, besi, baja, dll) yang berpotensi menyebabkan ODOL di jalan (termasuk pengembangan stasiun barang dan dry port moda kereta api).
 - Pengembangan kawasan sekitar Pelabuhan Utama sebagai Simpul Logistik.
 - Penetapan jaringan lintas angkutan barang yang mengakses kawasan industri/produksi ke simpul outlet dan jaringan distribusi nasional.
 - Pelaksanaan MRLL dan MKLL pada jaringan lintas angkutan barang dan koridor utama nasional.
 - Penuntasan ODOL pada angkutan barang moda jalan. (termasuk optimalisasi jembatan timbang)

- Dukungan konektivitas transportasi jalan dan kereta api menuju IKN dari kawasan sekitar.
- d. Arah Kebijakan 4 (AK4) Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi, antara lain dilakukan melalui:
- Mengembangkan sistem angkutan massal pada seluruh PKN sesuai klasifikasi ukuran kotanya.
 - Memperkuat sistem integrasi pendukung angkutan massal, meliputi fasilitas integrasi, sistem feeder, sistem pembayaran terintegrasi, dan jalur.
 - Reorientasi tata ruang perkotaan (*TOD, mix-use, urban renewal*).
 - Menerapkan *Intelligent Transport System* untuk pengaturan lalu lintas dan angkutan perkotaan.
 - Dukungan pengembangan *Intelligent Transport System* pada KIPP IKN.
 - Dukungan pengembangan jaringan angkutan massal berbasis jalan/kereta api di KIPP IKN.
- e. Arah Kebijakan 5 (AK5) Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi, antara lain dilakukan melalui:
- Memanfaatkan teknologi untuk penyediaan konektivitas ke seluruh NKRI (sea plane, drone, dll).
 - Meningkatkan pemberian subsidi pelayanan transportasi yang lebih tepat sasaran.
 - Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan angkutan laut perintis moda jalan, SDP, tol laut, KA dan udara.
 - Mendukung pengembangan sistem angkutan umum kawasan perdesaan.
 - Memfasilitasi pengembangan layanan angkutan khusus (bus sekolah, kapal rumah sakit, pesawat siaga, kapal ternak, kapal pelra, kapal rede, dlsb).

- Membangun armada transportasi laut rakyat untuk melayani pulau - pulau terpencil dan terluar dengan harga terjangkau melalui penguatan Sistem Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (sesuai mandat Perpres 74 Tahun 2021), termasuk rancang bangun kapal pelra, dukungan pembiayaan kapal pelra, dukungan muatan, dukungan BBM dan melanjutkan DAK fisik pendukung penyediaan terminal/pelabuhan lokal yang melayani.
 - Pembangunan halte sungai yang menghubungkan kawasan yang tidak dapat dijangkau dengan moda transportasi angkutan jalan
- f. Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
- Penyusunan Masterplan Pengembangan Transportasi dalam Kawasan Strategis Nasional.
 - Mendorong pengembangan Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM).
 - Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ).
 - Pengembangan fasilitas integrasi antarmoda.
 - Meningkatkan efektivitas dan integrasi jaringan transportasi laut dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan konektivitas yang handal dan berdaya saing.
 - Integrasi sistem Inaportnet dalam mendukung *National Logistic Ecosystem* (NLE).
 - Penyelenggaraan Layanan Angkutan Multimoda pada KSPN yang menghubungkan bandara dengan pelabuhan penyeberangan.

2. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 2 (SS2) Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi, yaitu:
- a. Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan kualitas pelayanan angkutan publik sebagai bagian dari pelayanan dasar, antara lain dilakukan melalui:
 - Meningkatkan standar regularitas/reliabilitas dan kualitas pelayanan angkutan kelas ekonomi/perintis bersubsidi untuk golongan ekonomi/wilayah tertentu.
 - Memberikan dukungan pengoperasian angkutan massal perkotaan kepada Daerah (program BTS).
 - Optimalisasi pengelolaan sistem PSO angkutan umum perkotaan (KA Commuter, BTS BRT perkotaan) yang lebih tepat sasaran.
 - Melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai pengguna (*customers satisfaction index*) terhadap pelayanan transportasi untuk mengetahui sebesar baik dan puas masyarakat terhadap layanan transportasi yang sudah disediakan oleh pemerintah.
 - b. Arah Kebijakan 8 (AK8) Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan melalui digitalisasi, antara lain dilakukan melalui:
 - Pemenuhan standar pelayanan pada pelabuhan hub internasional dan bandara internasional.
 - Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas dan integrasi pelayanan pada sistem angkutan penumpang.
 - Optimalisasi integrasi pelayanan transportasi unimodal dan multimoda barang (termasuk: INSW, NLE, Airport Cargo-Village, Market Place Trucking, dlsb).

c. Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan aksesibilitas publik terhadap pelayanan jasa transportasi yang inklusif dan berkeadilan, antara lain dilakukan melalui:

- Dukungan pembangunan fasilitas kesetaraan gender di simpul transportasi, berupa ruang Ibu Menyusui, bangunan toilet wanita, tempat parkir khusus wanita, Ruang Playground (ruang bermain anak).
- Penerapan GEDSI di bidang transportasi.
- Meningkatkan efektivitas dan integrasi jaringan transportasi dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan konektivitas yang handal dan berdaya saing.
- Penerapan SPM untuk penumpang ramah perempuan, anak dan berkebutuhan khusus.
- Perluasan jaringan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi yang memenuhi standar fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- Pembentukan satuan tugas pelayanan penyandang disabilitas pada setiap simpul transportasi.
- Pengembangan sistem pelayanan terintegrasi (*Mobility As A Service/MAAS*) berbasis TIK untuk penyandang disabilitas.

d. Arah Kebijakan 10 (AK10) Percepatan transisi energi serta penerapan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim, antara lain dilakukan melalui:

- Memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Meningkatkan dan menambah porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran listrik PLN melalui insentif elektifikasi kendaraan bermotor umum, pemanfaatan bahan bakar alternatif pada angkutan penumpang dan barang

berbasis jalan dan pemanfaatan bahan bakar alternatif pada sarana perkeretaapian.

- Meningkatkan akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target net zero emission melalui pemanfaatan tenaga surya dan/atau elektrifikasi operasional sarana prasarana transportasi, implementasi regulasi uji tipe/berkala kendaraan, penerapan OPS, SEEMP, AFS pada pelayaran dan penerapan ICAO- CORSIA pada penerbangan.
- Melanjutkan program biodiesel dan bio-avtur dari kelapa sawit melalui pemanfaatan Bio Diesel untuk Angkutan Jalan, pemanfaatan bio diesel untuk angkutan kereta api, program Implementasi Biodiesel international Maritime Organization (IMO) MEPC 82/INF.XX, XX July 2024 tentang Indonesia Biodiesel Program Implementation to Reach Net Zero Emission dan menjalankan dan implementasi Sustainable Aviation Fuel (SAF) Roadmap.

3. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 3 (SS3) Meningkatnya keselamatan transportasi, yaitu:

a. Arah Kebijakan 11 (AK11) Pemenuhan (*compliance*) standar teknis sarana dan prasarana transportasi, antara lain dilakukan melalui:

- Meningkatkan kinerja pelaksanaan pengujian dan perizinan sarana dan prasarana.
- Meningkatkan kinerja monitoring dan audit keselamatan sarana dan prasarana.
- Meningkatkan efektivitas pelaksanaan SOP tanggap darurat gangguan sarana dan prasarana.
- Meningkatkan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan ketanggapan penanganan gangguan keselamatan.

- Program pengembangan fasilitas navigasi penerbangan dan fasilitas keamanan penerbangan yang menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan standar regulasi Internasional (ICAO).
 - Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana.
- b. Arah Kebijakan 12 (AK12) Peningkatan efektivitas koordinasi, pengawasan, dan pengendalian di lapangan, antara lain dilakukan melalui:
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui optimalisasi simpul transportasi sebagai fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan transportasi.
 - Meningkatkan pelaksanaan dan implementasi prosedur pengawasan dan pengendalian keselamatan dan keamanan transportasi.
 - Meningkatkan peran forum lalu lintas dan angkutan jalan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai merupakan wadah koordinasi antara instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
 - Melakukan simplifikasi aplikasi untuk memudahkan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengawasan dan pengendalian keselamatan dan keamanan transportasi.
- c. Arah Kebijakan 13 (AK13) Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
- Meningkatkan *safety awareness* dan peran masyarakat dalam peningkatan keselamatan transportasi.

- Meningkatkan kepatuhan Operator Transportasi untuk melakukan seft-assessment keselamatan.
 - Optimalisasi koordinasi antar K/L terkait dan Pemda dalam peningkatan keselamatan.
 - Meningkatkan efektivitas penegakan aturan keselamatan transportasi.
 - Meningkatkan DAK Fisik Keselamatan Jalan (untuk penanganan perlengkapan Jalan Daerah).
4. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 4 (SSp4) Meningkatnya kualitas kebijakan di bidang transportasi, yaitu:
- a. Arah Kebijakan 14 (AK14) Peningkatan relevansi kebijakan transportasi terhadap isu lintas sektoral (inklusivitas, gender, ibu dan anak, disabilitas, kemiskinan), antara lain dilakukan melalui:
- Perumusan kebijakan dan rencana aksi GEDSI (Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion) di bidang transportasi.
 - Penyusunan/Revisi NSPK (standar teknis) terkait penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana transportasi.
 - Revisi UU LLAJ terkait substansi kendaraan roda dua sebagai angkutan umum dan perusahaan angkutan umum berbasis online.
 - Penyusunan/revisi peraturan pelaksanaan terkait dengan penyelenggaraan dan perusahaan angkutan umum tidak dalam trayek.
- b. Arah Kebijakan 15 (AK15) Peningkatan kualitas perumusan kebijakan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
- Melaksanakan agenda mapping permasalahan dan kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah.

- Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan agenda setting (identifikasi permasalahan dan kebutuhan rumusan) kebijakan transportasi.
 - Meningkatkan kualitas formulasi kebijakan yang bersifat evidence-based dan inovatif yang berorientasi ke luar/stakeholders dan ke depan (*outward-looking dan forward-looking*).
- c. Arah Kebijakan 16 (AK16) Peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
- Mengoptimalkan pengorganisasian, komunikasi, monitoring dan evaluasi dalam implementasi kebijakan bidang transportasi.
 - Melaksanakan evaluasi atas efisiensi, efektivitas, dampak dan kemanfaatan, penerimaan stakeholders, serta responsivitas dari implementasi kebijakan bidang transportasi.
 - Pembentukan Tim Pemantau pelaksanaan GEDSI di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
5. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 5 (SSp5) Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten, yaitu:
- a. Arah Kebijakan 17 (AK17) Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang *link and match* dengan kebutuhan industri, teknologi dan pengembangan sarana prasarana transportasi, antara lain dilakukan melalui:
- Penyusunan *Training Needs Analysis* (TNA) dan *Grand Design* SDM Transportasi.
 - Meningkatkan jenis Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama Vokasi bidang transportasi sesuai dengan kebutuhan Industri, swasta, BUMN dan Luar Negeri.

- Penguatan SDM Transportasi berbasis wilayah dan kemasyarakatan (termasuk di dalamnya pola pembibitan, diklat pemberdayaan masyarakat (DPM), fasilitasi diklat operator di daerah, akses diklat ke daerah 3TP/DTPK, afirmasi bagi daerah tertentu/beasiswa).
- b. Arah Kebijakan 18 (AK18) Peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber daya serta fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan, antara lain dilakukan melalui:
- Menyempurnakan program talent pool dengan merekrut calon ASN terbaik.
 - Mendorong akses pendidikan bagi ASN yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan demi terciptanya regenerasi birokrasi.
 - Membangun SIN yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft kompetensi ASN maupun APH.
 - Meningkatkan pemenuhan penyediaan fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan.
- c. Arah Kebijakan 19 (AK19) Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain dilakukan melalui:
- Peningkatan standar pelaksanaan diklat, melalui penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
 - Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum diklat, penyediaan tenaga pendidik yang berkompeten, serta penyediaan fasilitas yang mendukung, peningkatan kerjasama dan penelitian.

- Peningkatan efektivitas pelaksanaan diklat pembentukan karakter SDM Transportasi dan *Leadership Training Program*.
6. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 6 (SSp6) Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan, yaitu:
- a. Arah Kebijakan 20 (AK20) Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
- Meningkatkan peran regulasi sebagai pendorong transformasi struktural penyelenggaraan sektor transportasi yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan.
 - Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan transportasi nasional.
 - Meningkatkan sinergi antarlembaga birokrasi dan antardaerah.
- b. Arah Kebijakan 21 (AK21) Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain dilakukan melalui:
- Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas kinerja pemerintahan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - Transformasi kelembagaan Kementerian Perhubungan menuju *Good Governance* yang didorong oleh pemanfaatan teknologi.
 - Penyederhanaan dan pengintegrasian sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - Pelaksanaan transformasi digital untuk mendorong penerapan SPBE dan smart government di lingkungan Kementerian Perhubungan.

- Peningkatan penerapan perizinan berusaha berbasis resiko (PPBR) dibidang transportasi.
- Peningkatan pencatatan dan optimalisasi pemanfaatan aset Kementerian Perhubungan.
- Peningkatan integritas, profesionalisme dan budaya kerja serta penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN Kementerian Perhubungan.
- Peningkatan kualitas manajemen kinerja dan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk pembentukan SDU (*Special Delivery Unit*) untuk memastikan tercapainya target kinerja dan kemanfaatan hasil pembangunan bidang perhubungan.

3.1.3 Arah Kebijakan BPSDM Perhubungan 2025-2029

Terdapat 5 Arah Kebijakan Utama BPSDM Perhubungan, diantaranya meliputi kebijakan terkait Diklat Vokasi, SDM, Sarana dan Prasarana, Kelembagaan, dan Kerjasama. Secara detail arah kebijakan tersebut diantaranya:

1. Penyelenggaraan Diklat Vokasi yang Berkualitas
 - a. Penyusunan *Training Needs Analysis* (TNA);
 - b. Penyusunan *Grand Design* SDM Transportasi;
 - c. Penyelenggaraan program Pola Pembibitan untuk pemenuhan kebutuhan
 - d. Penyelenggaraan Diklat Pembentukan, Diklat Teknis dan Diklat Peningkatan Kompetensi;
 - e. Penyelenggaraan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM);
 - f. Penyelenggaraan diklat untuk Operator transportasi;
 - g. Penyelenggaraan diklat di daerah 3TP/DTPK;
 - h. Peningkatan jumlah penelitian terapan yang terpublikasi dalam Jurnal Nasional/ Internasional;
 - i. Penyelenggaraan Program Pengabdian Masyarakat yang bersifat edukatif dan *community development*.

2. Pengembangan SDM Transportasi yang Profesional
 - a. Pemenuhan tenaga pendidik, kependidikan, dan ASN Transportasi yang professional dan berkarakter;
 - b. Pelaksanaan pembelajaran dari praktisi/ dosen Perguruan Tinggi dan industri dari dalam maupun luar negeri;
 - c. Pelaksanaan magang industri dan *stakeholder* bagi ASN Struktural dan Fungsional serta taruna baik di dalam maupun luar negeri;
 - d. Implementasi kurikulum berbasis karakter Pancasila, Kewarganegaraan Bela Negara dan pendidikan Anti Korupsi;
 - e. Pelaksanaan diklat Pembangunan Karakter SDM transportasi;
 - f. Pelaksanaan program *Leadership Training*;
 - g. Pelaksanaan Manajemen Talenta (*Talent Pooling*);
 - h. Pelaksanaan diklat peningkatan kompetensi (manajerial, teknis dan fungsional) ASN;
 - i. Pelaksanaan program Beasiswa Rintisan Gelar dan *Double Degree*;

3. Penyediaan Sarana Prasarana Diklat yang Berkelanjutan
 - a. Pemenuhan modernisasi sarana dan prasarana diklat beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi, transformasi digital, *artificial intelligence*, dan transportasi hijau;
 - b. Implementasi manajemen aset berbasis pada optimalisasi laboratorium/ simulator/ kelas/ Kapal latih, pemanfaatan bangunan/ gedung dan tanah/ lahan;
 - c. Peningkatan layanan akademik dan pembelajaran berbasis teknologi informasi, *blended learning*, *virtual reality* dan *smart class*;
 - d. Pemenuhan bahan ajar, modul belajar mandiri berbasis teknologi informasi;

- e. Peningkatan kapasitas perpustakaan digital (*E-Library*), penambahan jumlah E-Book, dan layanan jurnal nasional dan internasional;
 - f. Pengembangan Kapal latih dan Pesawat latih Seaplane beradaptasi pada kebutuhan industri.
4. Penyesuaian Kelembagaan Diklat yang Adaptif dan Terintegrasi
- a. Pembaharuan kurikulum dan silabus beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi, transformasi digital, *artificial intelligence*, dan transportasi hijau, *link-match* dengan kebutuhan Industri-dunia kerja (IDUKA);
 - b. Penerapan Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - c. Penerapan standarisasi kompetensi Internasional;
 - d. Penguatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
 - e. Peningkatan akreditasi lembaga diklat dan program studi serta revitalisasi prodi berbasis kebutuhan industri;
 - f. Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
 - g. Pengembangan prodi S2 Terapan;
 - h. Penguatan penjaminan mutu diklat melalui Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Satuan Pengawas Internal (SPI).
 - i. Penerapan Knowledge Management System menuju *Corporate University*
 - j. Penguatan kerangka regulasi pemenuhan dan peningkatan kualitas SDM bidang Transportasi.
 - k. Pemenuhan Lembaga Pendidikan yang mengedepankan pembentukan karakter religius, bermoral, sehat, cerdas, dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri dan bermanfaat.

5. Penyesuaian Kelembagaan Diklat yang Adaptif dan Terintegrasi
 - a. Peningkatan kerja sama dalam rangka pengembangan diklat;
 - b. Peningkatan kerja sama dalam rangka pemanfaatan utilitas aset;
 - c. Peningkatan kerja sama dalam rangka penyerapan lulusan ;
 - d. Peningkatan kerja sama dalam rangka praktek magang dan pertukaran pelajar luar negeri;
 - e. Peningkatan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas tenaga Peningkatan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas tenaga
 - f. Peningkatan kerja sama dalam penelitian terapan;
 - g. Peningkatan kerja sama dalam *sharing knowledge*;
 - h. Peningkatan kolaborasi dan kerja sama pelaksanaan diklat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, industri dan stakeholder terkait.

Berdasarkan Naskah Teknoratik Kementerian Perhubungan, Tujuan BPSDM yaitu “terwujudnya kebijakan SDM transportasi yang berkualitas”, dengan sasaran strategis berupa “Meningkatnya SDM transportasi yang Kompeten”.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan 2025-2029



Gambar 3.2 Penyusunan Renstra BPSDMP Tahun 2025-2029

3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi PPSDMAP 2025-2029

Arah kebijakan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan merupakan turunan dari arah kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang dapat diintervensi sesuai dengan tugas dan fungsi di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan arah kebijakan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Perhubungan yang Berkualitas.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki tugas dan fungsi untuk pelaksanaan pelatihan bagi Aparatur Kementerian Perhubungan untuk pelatihan manajerial, struktural dan fungsional memiliki kewajiban untuk memberikan pelatihan berkualitas sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi seluruh Aparatur Kementerian Perhubungan. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan dapat dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pelatihan, peningkatan kualitas pengajar/widyaiswara, serta peningkatan kualitas pelayanan pelatihan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan perlu mengimplementasikan beberapa kebijakan dan kegiatan antara lain:

- a. Penyusunan Training Needs Analysis (TNA);
- b. Penyusunan Grand Design Pelatihan Transportasi;
- c. Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Diklat Peningkatan Kompetensi;
- d. Peningkatan jumlah penulisan jurnal ilmiah bagi Widyaiswara;

2. Pengembangan SDM Transportasi yang Profesional
 - a. Pemenuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Professional Dan Berkarakter;
 - b. Implementasi Kurikulum Berbasis Karakter Pancasila, Kewarganegaraan Bela Negara Dan Pendidikan Anti Korupsi;
 - c. Pelaksanaan Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi;
 - d. Pelaksanaan Program Leadership Training;
 - e. Pelaksanaan Manajemen Talenta (*Talent Pooling*);
 - f. Pelaksanaan Diklat Peningkatan Kompetensi (Manajerial, Teknis Dan Fungsional) ASN;
 - g. Pelaksanaan Program Beasiswa Rintisan Gelar Dan *Double Degree*;
3. Penyediaan Sarana Prasarana Diklat yang Berkelanjutan
 - a. Pemenuhan modernisasi sarana dan prasarana diklat beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi, transformasi digital, *artificial intelligence*, dan transportasi hijau;
 - b. Implementasi manajemen aset berbasis pada optimalisasi bangunan / gedung dan tanah / lahan;
 - c. Peningkatan layanan pelatihan dan pembelajaran berbasis teknologi informasi, *blended learning*, *virtual reality*, dan *smart class*;
 - d. Pemenuhan bahan ajar, modul belajar mandiri berbasis teknologi informasi;
4. Penyesuaian Kelembagaan Diklat yang Adaptif dan Terintegrasi
 - a. Pembaharuan kurikulum dan silabus beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi, transformasi digital, *artificial intelligence*.
 - b. Penerapan *Knowledge Management System* menuju *Corporate University*

5. Penguatan Kerjasama Pentahelix
 - a. Peningkatan kerja sama dalam rangka pengembangan diklat;
 - b. Peningkatan kerja sama dalam rangka pemanfaatan utilisasi aset;
 - c. Peningkatan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas tenaga pendidik;
 - d. Peningkatan kerja sama dalam *sharing knowledge*;
 - e. Peningkatan kolaborasi dan kerja sama pelaksanaan diklat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, industri dan stakeholder terkait.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BP3KSDMT 2025-2029

Arah kebijakan BP3KSDMT merupakan penjabaran dari kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BP3KSDMT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Arah kebijakan ini difokuskan secara khusus pada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter Aparatur Perhubungan dalam rangka membentuk aparatur yang berintegritas, beretika, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik. Arah kebijakan dan strategi BP3KSDMT Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Aparatur Perhubungan.

Arah kebijakan ini diarahkan pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter Aparatur Perhubungan yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan pelatihan difokuskan pada pembentukan nilai, sikap, dan perilaku aparatur yang mencerminkan integritas, etika, disiplin, tanggung jawab, dan semangat pengabdian. Adapun strategi pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan perencanaan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter Aparatur Perhubungan;
- b) Pengembangan kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter;

- c) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter secara berjenjang;
- d) Peningkatan kualitas tenaga pengajar/widyaiswara di bidang pembangunan karakter.

2. Penguatan Internalisasi Nilai dan Budaya Kerja Aparatur Perhubungan.

Arah kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai dasar Aparatur Perhubungan melalui pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter. Nilai yang dikembangkan meliputi nilai Pancasila, integritas, etika jabatan, disiplin, tanggung jawab, serta budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik. Adapun strategi pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a) Implementasi kurikulum pembangunan karakter berbasis nilai Pancasila dan kebangsaan;
- b) Penyelenggaraan pelatihan pembangunan karakter yang mendukung pembentukan budaya kerja Aparatur Perhubungan;
- c) Integrasi nilai dan etika Aparatur Perhubungan dalam seluruh proses pembelajaran pembangunan karakter.

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter

Arah kebijakan ini diarahkan untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter Aparatur Perhubungan secara efektif dan berkelanjutan. Adapun strategi pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter sesuai standar;
- b) Pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran pembangunan karakter;
- c) Penerapan prinsip efisiensi dan keberlanjutan dalam pengelolaan sarana dan prasarana (*Green Campus*)

4. Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter

Arah kebijakan ini ditujukan untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter Aparatur Perhubungan dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun strategi pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter;
- b) Penerapan sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter;
- c) Penguatan akuntabilitas dan pelaporan kinerja BP3KSDMT.

5. Penguatan Koordinasi dan Sinergi dalam Pembangunan Karakter Aparatur Perhubungan

Arah kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter Aparatur Perhubungan. Adapun strategi pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan koordinasi dengan BPSDMP dan unit *pengembangan* SDM terkait;
- b) Pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pembangunan karakter aparatur;
- c) Pertukaran pengetahuan dan praktik baik dalam pembangunan karakter Aparatur Perhubungan.

3.3 Manajemen Risiko Indikator Kinerja Kegiatan BP3KSDMT

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BP3KSDMT Tahun 2025–2029 tersebut, pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan memerlukan dukungan tata kelola yang efektif, adaptif, serta mampu mengantisipasi berbagai potensi hambatan dalam pelaksanaannya. Dinamika kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan aparatur berpotensi menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko yang terstruktur sebagai bagian integral dari implementasi arah kebijakan dan strategi BP3KSDMT.

Manajemen risiko ini diarahkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi risiko yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Berikut merupakan tabel uraian Manajemen Risiko pada setiap Indikator Kinerja kegiatan (IKK) pada Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi:

Tabel 3.2 Identifikasi Risiko Berdasarkan Sasaran dan Indikator

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (IKK)	Kategori Risiko	Identifikasi Risiko	Dampak	Mitigasi
SK 8. Meningkatnya Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan	IKK 20. Persentase Peserta Pelatihan Aparatur (Target: 95%)	Strategis, Operasional	Kurikulum diklat tidak selaras dengan standar kompetensi teknis terbaru di sektor perhubungan.	Target persentase kelulusan tidak tercapai dan kompetensi SDM rendah.	Peninjauan dan pemutakhiran kurikulum berkala melibatkan unit teknis terkait.
SK 9. Terwujudnya Organisasi yang Agile dan SDM Unggul	IKK 22. Indeks Profesionalisme ASN (Target: 76)	SDM, Operasional	Kompetensi dosen atau instruktur belum memenuhi standar profesionalisme yang dipersyaratkan.	Menurunnya mutu pengajaran dan nilai indeks profesionalisme tidak tercapai.	Peningkatan pendidikan, pelatihan teknis, dan sertifikasi bagi instruktur/dosen.
SK 10. Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi Layanan Prima	IKK 24. Persentase Pemenuhan Akuntabilitas (Target: 100%)	Operasional	Ketidakteraturan dalam pengelolaan arsip dan sistem persuratan elektronik.	Penurunan akuntabilitas layanan dan hambatan administrasi operasional.	Penguatan pengawasan pengelolaan arsip dan optimalisasi sistem E-Office.
	IKK 25. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Target: 90)	Keuangan, Operasional	Keterlambatan dalam proses pengadaan barang/jasa melalui LPSE dan penyerapan PNBP.	Nilai IKPA rendah dan pelaksanaan anggaran tidak efektif.	Monitoring ketat kalender anggaran dan percepatan proses pengadaan barang/jasa.
	IKK 26. Nilai SAKIP (Target: 78)	Operasional	Ketidaksesuaian data dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) dan Perjanjian Kinerja.	Nilai SAKIP tidak mencapai target dan rendahnya penilaian tata kelola.	Evaluasi berjenjang terhadap draf LKIP dan bimbingan teknis penyusunan rencana kinerja.
SK 12. Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP	IKK 28. Persentase Pelaksanaan Kerjasama (Target: 100%)	Operasional	Pelaksanaan kerjasama dalam negeri tidak berjalan sesuai dengan naskah MoU/PKS.	Hubungan kemitraan tidak produktif dan target kerjasama gagal tercapai.	Monitoring rutin terhadap implementasi setiap naskah kerjasama yang telah disepakati.

- a. **Manajemen Risiko pada IKK 20 Persentase Peserta Pelatihan Aparatur** menghadapi risiko strategis dan operasional berupa ketidaksesuaian kurikulum diklat dengan standar kompetensi teknis terbaru di sektor

perhubungan. Risiko tersebut berpotensi menurunkan tingkat kelulusan dan kualitas kompetensi lulusan. Mitigasi dilakukan melalui peninjauan dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dengan melibatkan unit teknis terkait.

- b. **Manajemen Risiko pada IKK 22 Indeks Profesionalisme ASN** dihadapkan pada risiko keterbatasan kompetensi dosen atau instruktur yang belum sepenuhnya memenuhi standar profesionalisme. Risiko ini dapat berdampak pada mutu pembelajaran dan pencapaian indeks profesionalisme. Upaya mitigasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas instruktur melalui pendidikan, pelatihan teknis, dan sertifikasi kompetensi.
- c. **Manajemen Risiko pada IKK 24 Persentase Pemenuhan Akuntabilitas**, risiko operasional berupa pengelolaan arsip dan sistem persuratan elektronik yang belum optimal berpotensi menurunkan akuntabilitas layanan. Mitigasi dilakukan melalui penguatan pengawasan arsip dan optimalisasi penerapan sistem E-Office.
- d. **Manajemen Risiko pada IKK 25 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**, risiko keterlambatan pengadaan barang/jasa dan penyerapan PNPB dapat berdampak pada rendahnya nilai IKPA. Mitigasi dilakukan melalui monitoring kalender anggaran dan percepatan proses pengadaan.
- e. **Manajemen Risiko pada IKK 26 Nilai SAKIP**, risiko ketidaksesuaian data dalam penyusunan LKIP dan Perjanjian Kinerja berpotensi menurunkan nilai SAKIP, yang dimitigasi melalui evaluasi berjenjang dan penguatan fungsi reviu internal.
- f. **Manajemen Risiko pada IKK 28 Persentase Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan**, menghadapi risiko operasional berupa ketidaksesuaian pelaksanaan kerjasama dengan naskah MoU atau PKS. Risiko ini dapat menghambat pencapaian target kerjasama, sehingga mitigasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berkala serta penguatan koordinasi dengan mitra.

Dengan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dan berfokus pada pencapaian IKK, BP3KSDMT diharapkan mampu mengendalikan potensi

risiko secara efektif guna mendukung pencapaian sasaran strategis secara optimal dan berkelanjutan

3.4 Kerangka Regulasi BP3KSDMT 2025-2029

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (BP3KSDMT) berlandaskan pada kerangka regulasi yang menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter Aparatur Perhubungan. Kerangka regulasi tersebut disusun untuk menjamin kepastian hukum, keselarasan kebijakan, serta akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan karakter Aparatur Perhubungan.

Kerangka regulasi BP3KSDMT mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional, sektoral, serta internal Kementerian Perhubungan, yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai landasan pengembangan aparatur yang berintegritas, profesional, dan beretika.
3. Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, sebagai acuan arah pembangunan nasional, termasuk pembangunan sumber daya manusia aparatur.
4. Peraturan Presiden tentang Kementerian Perhubungan, sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
5. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi BP3KSDMT sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan BPSDMP.
6. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, sebagai acuan kebijakan pengembangan SDM Aparatur Perhubungan.
7. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (BP3KSDMT), sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembangunan

karakter Aparatur Perhubungan. Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2025–2029, sebagai pedoman perencanaan strategis BP3KSDMT.

8. Kebijakan internal dan pedoman teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter Aparatur Perhubungan.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis satuan kerja (Satker) periode 2025–2029, Kerangka Regulasi harus memprioritaskan penyusunan dan penguatan regulasi internal. Adapun daftar kerangka regulasi BP3KSDMT periode 2025-2029 yang akan disusun sebagai berikut:

- a. Peraturan internal mengenai Kurikulum Diklat Karakter Berbasis Core Values ASN: Melakukan kodifikasi kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai integritas dan profesionalisme sesuai amanat UU ASN dan RPJMN 2025–2029.
- b. Pedoman Teknis Pelaksanaan Diklat Pembangunan Karakter: Menyusun petunjuk teknis yang lebih detail sebagai turunan dari Peraturan Menteri Perhubungan tentang BP3KSDMT untuk menjamin standar kualitas pelaksanaan diklat.
- c. Regulasi Sistem Evaluasi dan Monitoring Dampak Diklat: Menyusun instrumen hukum internal untuk mengukur efektivitas pembangunan karakter pada Aparatur Perhubungan pasca-diklat.
- d. Penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) Satker 2025–2029: Menyusun dokumen Renstra BP3KSDMT yang mengacu pada Renstra BPSDMP 2025–2029 sebagai pedoman operasional strategis.
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Berbasis Tata Kerja Baru: Memperbarui pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang terbaru.

Kerangka regulasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan BP3KSDMT agar selaras dengan kebijakan nasional dan sektoral, serta mendukung terwujudnya Aparatur Perhubungan yang berkarakter, berintegritas, dan profesional.

3.5 Kerangka Kelembagaan BP3KSDMT 2025-2029

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi (BP3KSDMT) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan. Kedudukan kelembagaan BP3KSDMT dibentuk sebagai turunan langsung dari mandat pengembangan kompetensi Aparatur Perhubungan, khususnya dalam aspek pembangunan karakter, integritas, dan kepemimpinan.

Kerangka kelembagaan BP3KSDMT disusun untuk memastikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan karakter Aparatur Perhubungan agar sejalan dengan kebijakan dan arah strategis Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan. Dalam kerangka tersebut, BP3KSDMT berperan sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter yang bersifat operasional dan aplikatif. Secara kelembagaan, BP3KSDMT menjalankan fungsi utama sebagai berikut:

- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter Aparatur Perhubungan, yang meliputi pembentukan nilai integritas, etika, disiplin, nasionalisme, serta tanggung jawab sebagai aparatur negara.
- Implementasi kebijakan dan program pelatihan aparatur yang ditetapkan oleh Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, khususnya pada pelatihan kepemimpinan dan penguatan karakter.
- Penyelenggaraan program pengembangan kepemimpinan aparatur sebagai bagian dari pembentukan aparatur yang profesional dan berkarakter.
- Pengelolaan sarana, prasarana, dan metode pembelajaran pembangunan karakter, termasuk pendekatan experiential learning dan pembelajaran berbasis nilai.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelatihan pembangunan karakter, sebagai bahan umpan balik bagi Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan dalam perumusan kebijakan lanjutan.

Kerangka kelembagaan BP3KSDMT juga dirancang untuk mendukung integrasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur di lingkungan BPSDMP melalui koordinasi yang erat dengan pusat dan unit pelaksana teknis lainnya. Sinergi kelembagaan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pengembangan Aparatur Perhubungan yang terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada penguatan karakter.

Dengan kerangka kelembagaan tersebut, BP3KSDMT diharapkan mampu menjadi unit pelaksana strategis dalam mendukung pencapaian sasaran Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, khususnya dalam menghasilkan Aparatur Perhubungan yang berkarakter, berintegritas, dan siap mendukung penyelenggaraan transportasi nasional yang profesional.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja BP3KSDMT

Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi sebagai salah satu unit kerja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan memiliki kewajiban untuk turut mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Adapun sasaran strategis program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang dapat diintervensi oleh Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi SSP.6 dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang baik. Adapun Sasaran, Indikator Kinerja, serta formulasi perhitungan Sasaran Strategis program Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Sasaran Strategis Program BP3KSDMT

SS	SASARAN	IKSS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
SSp.6	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik	IKSSp.6	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	Nilai Indeks RB atas kinerja organisasi Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB

Adapun untuk mengukur capaian Sasaran Strategis Program di Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi, telah ditetapkan Indikator Kinerja Program Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi yaitu IKP 4 terkait dengan Indeks Tata Kelola Lembaga Badan Pengembangan SDM Perhubungan dengan formula perhitungan serta target capaian pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Target Capaian Kinerja BP3KSDMT Tahun 2025-2029

IKP	URAIAN	KODE	RUMUS	DEFINISI / PENJELASAN	2025	2026	2027	2028	2029
IKP 4	Indeks Tata Kelola Lembaga BPSDMP	Ckelola	$\text{Ckelola: (Cparaturat} \times 10\%) + (\text{CKebijakan} \times 10\%) + (\text{CSDM} \times 10\%) + (\text{Cregulasi} \times 10\%) + (\text{Cakuntabilitas} \times 10\%) + (\text{Cinformasi} \times 10\%) + (\text{Ckerjasama} \times 10\%) + (\text{CIKPA} \times 15\%) + (\text{CSAKIP} \times 15\%)$	Persentasi peningkatan kualitas tata kelola pemerintah yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan 2025 kelola 2026 2027 2028 2029 Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang dihitung berdasarkan kualitas Program dan Pelayanan.	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00

Indikator kinerja program Renstra BP3KSDMT 2025-2029 terdiri dari satu IKP Indeks Tata Kelola Lembaga BPSDMP yang dijabarkan dengan rumus, definisi/penjelasan, serta target capaian dari tahun 2025 sampai 2029 sesuai dengan tabel di atas. Adapun indikator kinerja kegiatan Renstra Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi Tahun 2025-2029 terdiri dari 6 Indikator Kinerja Kegiatan. Hubungan antara Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) bersifat hierarkis dan saling mendukung dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. IKK merupakan ukuran capaian keluaran (output) dari kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian IKP, yang berfungsi mengukur hasil (*outcome*) program. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang diukur melalui IKK menjadi fondasi utama bagi tercapainya IKP yang lebih bersifat strategis.

Secara konseptual, IKK berperan sebagai penopang atau komponen pembentuk IKP, di mana akumulasi dan kualitas capaian kegiatan akan menentukan keberhasilan program secara keseluruhan. Apabila IKK tidak tercapai atau kualitasnya rendah, maka IKP cenderung tidak akan optimal. Sebaliknya, pencapaian IKK yang efektif dan efisien akan memperbesar peluang program memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat, sehingga mendukung perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja berbasis hasil. Adapun IKK, Formula dan Target Capaian IKK Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kegiatan BP3KSDMT

IKK	URAIAN	KODE	RUMUS	2025	2026	2027	2028	2029
IKK 20.	Persentase Peserta Pelatihan Aparatur	Caparatur	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan aparatur pada tahun (n) / Target peserta yang mengikuti pelatihan aparatur pada tahun (n) x 100%	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00
IKK 22.	Indeks Profesionalisme ASN	CSDM	Penilaian tingkat profesionalitas pegawai ASN berdasarkan 4 (empat) dimensi, yaitu dimensi Kualifikasi (25%) dari keseluruhan pengukuran, Kompetensi (40%) dari keseluruhan pengukuran dan Kinerja (30%) dari keseluruhan pengukuran serta Disiplin (5%) dari keseluruhan pengukuran	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
IKK 24.	Persentase Pemenuhan Akuntabilitas di	Cakuntabilitas	Realisasi 1 + Realisasi 2	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00

IKK	URAIAN	KODE	RUMUS	2025	2026	2027	2028	2029
	Lingkungan BPSDMP		keterangan Realisasi 1 : Jumlah unit yang diadakan pada tahun (n) / Target unit yang yang diadakan pada tahun (n) x 50% Realisasi 2 : Jumlah layanan yang dilaksanakan pada tahun (n) / Target layanan yang dilaksanakan pada tahun (n) x 50%					
IKK 25.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	CIKPA	Σ (Revisi DIPA x 10%)+(Deviasi halaman III DIPA x 10%)+(Penyerapan Anggaran x 20%)+(Belanja Kontraktual x 10%)+(Penyelesaian Tagihan x 10%)+(Penyelesaian UP dan TUP x 10%)+(Dispensasi SPM x 5%)+(Capaian Output x 25%)	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00
IKK 26.	Nilai SAKIP	CSAKIP	Perencanaan Kinerja, dengan bobot 30% + Pengukuran Kinerja, dengan bobot 30% + Pelaporan Kinerja, dengan bobot 15% + Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dengan bobot 25%	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00
IKK 28.	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama dan Kemitraan	Ckerjasama2	Jumlah kerja sama yang ditindaklanjuti pada tahun (n) x 40% / Jumlah seluruh kerja sama yang berlaku pada tahun (n) x 60%	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00

4.2 Kerangka Pendanaan BP3KSDMT 2025-2029

Skema pembiayaan untuk Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi dapat dibiayai dari beberapa sumber pendanaan utama, yaitu:

1. Rupiah Murni: Pendanaan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang berupa dana dalam bentuk rupiah.
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP): Pendapatan yang tidak bersumber dari pajak, seperti biaya administrasi dan pelayanan lainnya.

Skema ini bertujuan untuk memastikan bahwa Sumber Daya Manusia di Kementerian Perhubungan dapat ditingkatkan dan diperbaiki, serta mendukung pembangunan infrastruktur pendukung untuk pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

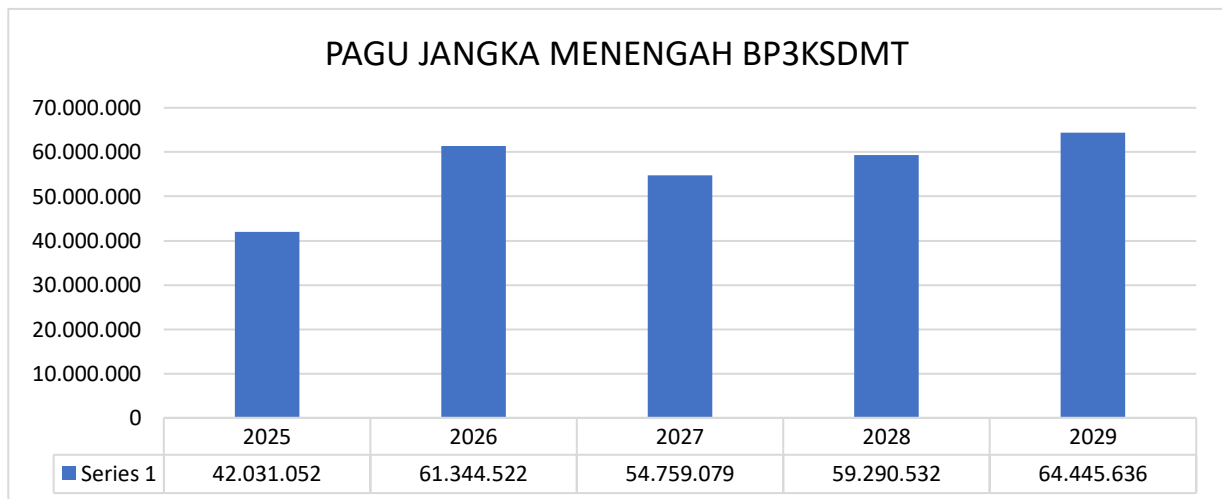
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi untuk periode 2025-2029 mendapatkan rencana pagu anggaran sebesar Rp 218.870.820.000,00 dengan proporsi sumber pendanaan 87 % berasal dari Rupiah Murni (RM), 13 % berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jumlah anggaran Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi tersebut merupakan jumlah yang sudah tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Adapun jumlah anggaran yang sudah terakomodir dalam RPJMN 2025-2029 terbagi

dalam 5 tahun dengan rincian rencana anggaran per tahun (dalam ribuan rupiah) sebagai berikut:

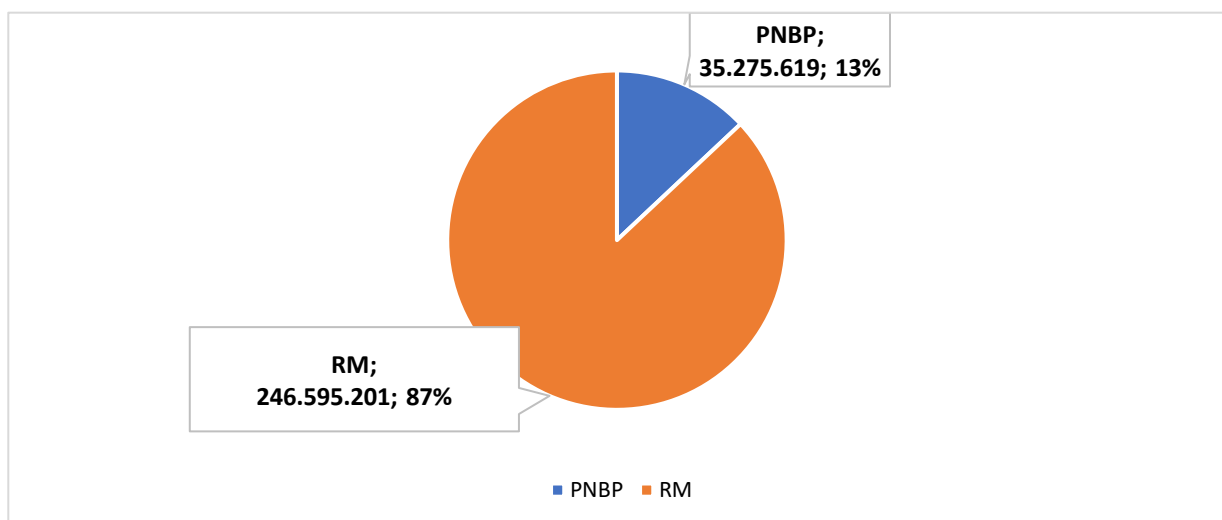
Tabel 4.4 Kebutuhan Anggaran Per Tahun BP3KSDMT

2025	2026	2027	2028	2029
42.031.052	61.344.522	54.759.079	59.290.532	64.445.636

Adapun secara garis anggaran per tahun BP3KSDMT periode tahun 2025-2029 serta grafik sumber dana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.1 Grafik Pagu Jangka Menengah BP3KSDMT Periode 2025-2029



Gambar 4.2 Grafik Sumber Pendanaan BP3KSDMT Periode 2025-2029

Dalam RPJMN 2025-2029, Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi mendapatkan sumber pendanaan sebesar 87% dari Rupiah Murni, dan 13% dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sumber pendapatan PNBP di Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi didapatkan dari kerja sama pelaksanaan diklat bagi Aparatur Sipil Negara di dalam dan di luar Kementerian Perhubungan dan juga berasal dari penyewaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi baik oleh instansi Pemerintah maupun Swasta. Adapun target PNBP Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi untuk periode 2025-2029 (dalam ribuan rupiah) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Target PNBP BP3KSDMT Tahun 2025-2029

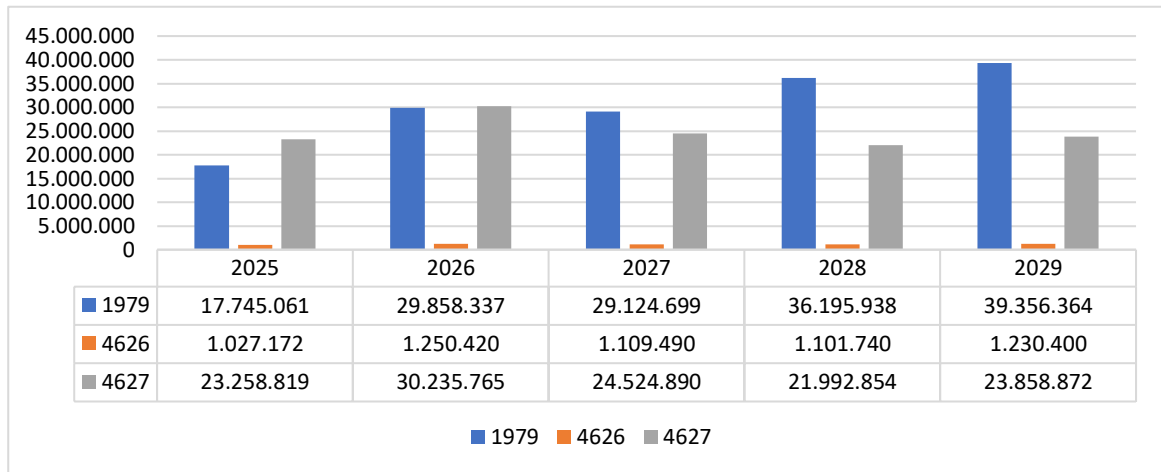
KODE SATKER	SATKER/UPT PNBP/BLU BPSDMP	2025	2026	2027	2028	2029
419173	BP3KSDMT	10.048.450	10.471.191	10.477.591	10.480.791	10.483.991

Alokasi pembiayaan Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi saat ini hanya terbagi dalam 1 (satu) program yaitu dukungan manajemen yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan. Adapun rekapitulasi alokasi pendanaan per program/kegiatan Renstra BP3KSDMT Tahun 2025-2029 (dalam ribuan rupiah) sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rekap Alokasi Berdasarkan Program/Kegiatan Renstra BP3KSDMT 2025-2029

KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
WA	Dukungan Manajemen	42.031.052	61.344.522	54.759.079	59.290.532	64.445.636	281.870.820
1979	Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan	17.745.061	29.858.337	29.124.699	36.195.938	39.356.364	152.280.399
4626	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi	1.027.172	1.250.420	1.109.490	1.101.740	1.230.400	5.719.222
4627	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum SDM Transportasi	23.258.819	30.235.765	24.524.890	21.992.854	23.858.872	123.871.199

Adapun grafik rekap alokasi anggaran Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi (dalam ribuan rupiah) dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.3 Grafik Rekap Alokasi Berdasarkan Program/Kegiatan Renstra BP3KSDMT 2025-2029

Adapun rincian kerangka pendanaan Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi Tahun 2025-2029 (dalam ribuan rupiah) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 Rekap Alokasi Kegiatan Program Dukungan Manajemen (WA)

KOMPONEN / SUB KOMPONEN	Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
Komponen: [1979.AEC.001.051] Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait	Kesepakatan	4	6	8	10	12	118.076	187.672	119.250	115.750	62.500	603.248
A <i>Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah (KL dan BUMN/BUMD)</i>	Kesepakatan	2	2	4	5	6	43.612	83.848	44.000	43.250	55.000	269.710
B <i>Kerja Sama Antar Instansi Swasta/Lembaga Terkait (PTN, PTS, SMA, SMP)</i>	Kesepakatan	2	4	4	5	6	74.464	103.824	75.250	72.500	7.500	333.538
Komponen: [1979.EBA.963.051] Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan	LAYANAN	2	2	2	2	2	211.012	424.323	233.022	205.550	212.200	1.286.107
A <i>Survey Kepuasan Masyarakat/Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat</i>	Layanan	1	1	1	1	1	66.772	181.280	67.772	66.800	70.450	453.074
B <i>Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	Layanan	1	1	1	1	1	144.240	243.043	165.250	138.750	141.750	833.033
Komponen: [1979.EBA.963.053] Layanan Sistem Informasi	LAYANAN	1	1	1	1	1	70.712	75.712	72.420	72.450	72.450	363.744
A <i>Penyusunan Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal</i>	Layanan	1	1	1	1	1	70.712	75.712	72.420	72.450	72.450	363.744

KOMPONEN / SUB KOMPONEN		Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
Komponen: [1979.EBB.951.051] Kendaraan Bermotor		Unit	0	1	5	11	10	0	300.000	1.310.000	670.000	130.000	2.410.000
A	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Listrik	Unit	0	1	1	1	0	0	0	1.250.000	600.000	0	1.850.000
B	Pengadaan Motor Dinas Fungsional	Unit	0	0	2	5	5	0	0	60.000	70.000	130.000	260.000
C	Pengadaan Kendaraan Angkutan Barang (pickup)	Unit	0	0	2	5	5	0	300.000	0	0	0	300.000
Komponen: [1979.EBB.951.052] Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		Unit	1	1	0	5	5	1.332.882	1.200.216	0	2.950.000	1.600.000	7.083.098
A	Pengadaan videotron indoor Aula Gedung Satria	Unit	1	0	0	0	0	1.332.882	0	0	0	0	1.332.882
B	Pengadaan Kabel FO	Unit	0	1	0	0	0	0	1.200.216	0	0	0	1.200.216
C	Aplikasi/Server Database Hasil Diklat	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
D	Pengadaan Cloud Storage	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
E	Pengeras Suara Portable	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	100.000	0	100.000
F	Drone	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	200.000	0	200.000
G	Pengadaan Peralatan Dokumentasi	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	150.000	0	150.000
H	Revitalisasi Jaringan Mekanikal Elektrikal Kawasan	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	200.000	200.000
I	Revitalisasi Jaringan Pipa Hidrant Dan APAR Kawasan Asrama	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	400.000	400.000
J	Revitalisasi Jaringan Pipa Hidrant Dan APAR Kawasan Bangunan Kelas	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	600.000	600.000
K	Revitalisasi Jaringan Mekanikal Elektrikal Kawasan	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	200.000	200.000
L	Revitalisasi Jaringan Pipa Hidrant Dan APAR Kawasan Asrama	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	200.000	200.000
Komponen: [1979.EBB.951.053] Peralatan Fasilitas Perkantoran		Unit	0	95	80	11	164	0	1.674.830	1.115.000	370.000	657.750	3.817.580
A	Pengadaan Kulkas	Unit	0	5	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
B	Pengadaan Laptop	Unit	0	10	10	10	0	0	98.000	155.000	170.000	0	423.000
C	Pengadaan Printer	Unit	0	5	0	0	0	0	47.500	0	0	0	47.500
D	Pengadaan Utilitas Lapangan	Unit	0	3	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
E	Pengadaan Rak Perlengkapan Diklat	Unit	0	30	0	0	0	0	255.000	0	0	0	255.000
F	Pengadaan Lemari Kaca	Unit	0	30	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
G	Pengadaan Flying Fox	Unit	0	1	0	0	0	0	352.330	0	0	0	352.330

KOMPONEN / SUB KOMPONEN		Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
H	Pengadaan Peralatan Diklat	Unit	0	1	0	0	0	0	300.000	300.000	0	400.000	1.000.000
I	Meja Kerja	Unit	0	1	30	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
J	Kursi	Unit	0	1	30	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
K	Personal Computer	Unit	0	1	10	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
L	Mesin Fotocopy	Unit	0	1	0	1	0	0	0	0	200.000	0	200.000
M	Pengadaan Peralatan Kesehatan	Unit	0	1	0	0	104	0	0	0	0	218.750	218.750
N	Kebutuhan Linen (sarung bantal. Sprei, selimut)	Unit	0	1	0	0	12	0	0	0	0	34.000	34.000
O	Bantal	Unit	0	1	0	0	12	0	0	0	0	5.000	5.000
P	Scanner	Unit	0	1	0	0	12	0	21.600	0	0	0	21.600
Q	Penghancur Kertas Micro Cut	Unit	0	1	0	0	12	0	4.500	0	0	0	4.500
R	Tempat Sampah	Unit	0	1	0	0	12	0	5.900	0	0	0	5.900
Komponen: [1979.EBB.971.052] Tanah untuk pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan		Unit	0	0	2	1	3	0	1.350.000	6.590.000	12.320.000	16.745.500	37.005.500
A	Jasa Konsultan Supervisi Pembangunan Gudang Sarana dan Prasarana Diklat	Paket	0	1	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
B	DED Pembangunan Toilet Permanen	Dokumen	0	1	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
C	DED Pembangunan Service Area	Dokumen	0	1	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
D	jasa konsultan Penyusunan DED Fire Hydrant	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
E	jasa konsultan Penyusunan DED Instalasi Listrik	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	270.000	0	0	270.000
F	jasa konsultan Penyusunan DED Instalasi Air	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000
G	Pembangunan Gudang Sarana dan Prasarana Diklat	Unit	0	0	1	0	0	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000
H	Pengadaan Tanah	Paket	0	0	1	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
I	Hotmix Jalan Akses	Paket	0	0	1	0	0	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000
J	Pembangunan Kantin	Unit	0	0	1	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
K	Pemasangan Paving block	Paket	0	0	1	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
L	Pembangunan Gedung Auditorium	Unit	0	0	0	1	1	0	0	0	11.000.000	12.000.000	23.000.000
M	Reviu DED Flat tahap 2	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
N	DED Gedung Auditorium	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
O	DED Fire Hydrant	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	120.000	0	120.000
P	Pengadaan Fire Hydrant	Paket	0	0	0	1	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
Q	Pembangunan Bengkel	Paket	0	0	0	0	1	0	0	0	0	400.000	400.000
R	Pembangunan Kamar Mandi/WC	Paket	0	0	0	0	1	0	0	0	0	300.000	300.000
S	Gudang Umum	Paket	0	0	0	0	1	0	0	0	0	500.000	500.000
T	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Paket	0	0	0	0	1	0	0	0	0	500.000	500.000

KOMPONEN / SUB KOMPONEN		Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
U	Ruang Penampungan Tempat Sampah Sementara	Paket	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100.000	100.000
V	DED Jaringan IT	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	135.000	135.000
W	Renovasi Gedung Utama	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000
X	Renovasi Gedung Audiovisual	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000
Y	Pengadaan Muebeler Klinik	Paket	0	0	0	0	1	0	0	0	0	160.500	160.500
Z	Review Master Plan 2025-2029	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	350.000	350.000
Komponen: [1979.EBC.954.051] Tenaga Pendidik yang Kompeten		ORANG	3	10	10	12	12	54.894	162.980	95.000	96.000	115.000	523.874
A	Diklat Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	Orang	3	10	10	12	12	54.894	162.980	95.000	96.000	115.000	523.874
Komponen: [1979.EBC.954.052] Tenaga Kependidikan yang Kompeten		ORANG	3	20	20	26	30	79.788	265.960	105.000	108.700	145.500	704.948
A	Diklat Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	Orang	3	20	20	26	30	79.788	265.960	105.000	108.700	145.500	704.948
Komponen: [1979.EBC.996.000] Diklat Training of Facilitator (TOF) Pengasuh Taruna/Mahasiswa		Orang	0	200	200	200	200	0	747.388	747.388	747.388	747.388	2.989.552
A	Diklat Training of Facilitator (TOF) Pengasuh Taruna/Mahasiswa	Orang	0	200	200	200	200	0	747.388	747.388	747.388	747.388	2.989.552
Komponen: [1979.EBC.996.097] Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. III		Orang	80	80	80	80	80	439.760	484.104	454.104	484.104	484.104	2.346.176
A	DIKLAT PEMBAKAR PKA/PIM III	Orang	80	80	80	80	80	439.760	484.104	454.104	484.104	484.104	2.346.176
Komponen: [1979.EBC.996.098] Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. IV		Orang	80	80	80	80	80	871.520	488.104	488.104	488.104	488.104	2.823.936
A	DIKLAT PEMBAKAR PKP/PIM TK.IV	Orang	80	80	80	80	80	871.520	488.104	488.104	488.104	488.104	2.823.936
Komponen: [1979.EBC.996.099] Diklat Pembangunan Karakter Taruna (CPNS)		Orang	2.520	2.960	2.960	2.960	2.960	5.821.620	7.402.372	7.305.611	7.402.372	7.202.372	35.134.347
A	Diklat Pembangunan Karakter CPNS	Orang	2520	2960	2960	2960	2960	5.821.620	7.402.372	7.305.611	7.402.372	7.202.372	35.134.347

KOMPONEN / SUB KOMPONEN		Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
Komponen: [1979.EBC.996.100] Diklat Pembangunan Karakter Aparatur Sipil Negara (ASN)		Orang	50	200	200	200	200	142.632	551.856	451.856	411.856	441.856	2.000.056
A	DIKLAT PEMBAKAR PNS DAN PPPK	Orang	50	200	200	200	200	142.632	551.856	451.856	411.856	441.856	2.000.056
Komponen: [1979.EBC.996.101] Diklat Pembangunan Karakter Calon Taruna		Orang	712	700	700	700	700	2.731.138	4.742.940	3.752.656	3.242.940	3.442.940	17.912.614
A	Diklat Pembangunan Karakter Tingkat SMA/SMK (Pola Pembibitan)	Orang	712	700	700	700	700	2.731.138	4.742.940	3.752.656	3.242.940	3.442.940	17.912.614
Komponen: [1979.EBC.996.501] Pelatihan Kerja Sama		ORANG	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000	5.871.027	9.799.880	6.285.288	6.510.724	6.808.700	35.275.619
A	Diklat Pembangunan Karakter Tingkat SMA/SMK (Madatukar Mandiri) PNB	Orang	600	1500	1500	1500	1500	1.392.680	3.656.840	1.801.941	2.017.377	1.892.680	10.761.518
B	Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi Bagi Masyarakat/Umum PNB	Orang	3000	4500	4500	4500	4500	4.353.347	5.888.040	4.353.347	4.353.347	4.701.020	23.649.101
C	Dukungan Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Diklat	Unit	10	20	20	20	20	125.000	255.000	130.000	140.000	215.000	865.000
Komponen: [4626.EBC.954.051] Layanan Kepegawaian		Orang	0	0	0	0	0	1.027.172	1.250.420	1.109.490	1.101.740	1.230.400	5.719.222
A	SOSIALISASI PERATURAN PEGAWAI	Layanan	1	1	1	1	1	162.720	163.840	172.000	175.250	180.000	853.810
B	KENAIKAN PANGKAT	Layanan	1	1	1	1	1	47.136	57.136	48.750	48.750	52.500	254.272
C	KESEMAPTAAN PEGAWAI	Layanan	1	1	1	1	1	273.700	298.700	300.450	300.450	314.750	1.488.050
D	PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL	Layanan	1	1	1	1	1	15.712	25.712	18.500	16.500	17.500	93.924
E	PENYUSUNAN FORMASI	Layanan	1	1	1	1	1	15.712	25.712	18.500	16.500	17.500	93.924
F	PENYUSUNAN LHKPN DAN E-PUPNS PEGAWAI	Layanan	1	1	1	1	1	15.712	20.712	18.500	16.500	17.500	88.924
G	PENYELENGGARAAN/PENGELOLAAN SIM DAN PPIID	Layanan	1	1	1	1	1	29.712	34.712	32.750	32.750	35.750	165.674
H	PENYUSUNAN DATABASE KEPEGAWAIAN	Layanan	1	1	1	1	1	15.712	25.712	18.500	16.500	17.500	93.924
I	UJIAN DINAS	Layanan	1	1	1	1	1	15.712	20.712	18.500	16.500	17.500	88.924
J	PENINGKATAN MOTIVASI BAGI PEGAWAI BP3KSDM TRANSPORTASI	Layanan	1	1	1	1	1	401.000	533.128	425.000	425.000	515.000	2.299.128
K	DAFTAR URUT KEPANGKATAN	Layanan	1	1	1	1	1	18.632	23.632	19.540	18.540	22.450	102.794
L	PENGELOLAAN DATA PEGAWAI	Layanan	1	1	1	1	1	15.712	20.712	18.500	18.500	22.450	95.874

KOMPONEN / SUB KOMPONEN		Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
Komponen: [4627.EBA.962.052] Layanan Umum dan Perengkapan		Layanan	4	4	4	4	4	2.536.613	3.056.584	2.650.943	2.489.122	2.632.019	13.365.280
A	Medical Check Up Pegawai	Layanan	1	1	1	1	1	96.000	108.000	98.000	98.000	105.000	505.000
B	Kehumasan dan Publikasi	Layanan	1	1	1	1	1	110.000	140.000	120.000	110.000	135.000	615.000
C	Penyelenggaraan Keprotokolan dan Humas	Layanan	1	1	1	1	1	35.712	65.712	38.250	38.250	65.450	243.374
D	Rapat-rapat koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Pokja/Rapat Kerja/Pimpinan/Dinas	Layanan	1	1	1	1	1	2.294.901	2.742.872	2.394.693	2.242.872	2.326.569	12.001.906
Komponen: [4627.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan		Layanan	1	1	1	1	1	6.815.713	7.980.034	7.090.034	6.996.488	7.283.171	36.165.440
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	1	1	1	6.815.713	7.980.034	7.090.034	6.996.488	7.283.171	36.165.440
Komponen: [4627.EBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Layanan	5	5	5	5	5	13.466.689	18.475.343	14.081.849	11.822.180	13.226.912	71.072.973
A	Kebutuhan Sehari - hari Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5.933.379	7.766.573	6.392.483	5.364.846	5.966.573	31.423.854
B	Langganan Daya dan Jasa	Layanan	1	1	1	1	1	996.120	1.056.120	1.000.120	1.000.120	1.056.120	5.108.600
C	Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	1	1	1	6.234.582	9.275.042	6.391.638	5.159.606	5.856.611	32.917.479
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	Layanan	1	1	1	1	1	127.608	127.608	127.608	127.608	127.608	638.040
E	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Padat Karya)	Layanan	1	1	1	1	1	175.000	250.000	170.000	170.000	220.000	985.000
Komponen: [4627.EBD.952.051] Layanan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		Dokumen	0	0	0	0	0	193.492	435.492	422.492	422.492	439.600	1.913.568
A	Penyusunan Pagu Kebutuhan	Layanan	1	1	1	1	1	70.638	70.638	70.638	70.638	72.450	355.002
B	Penyusunan Pagu Indikatif	Layanan	1	1	1	1	1	15.328	21.328	24.328	24.328	24.750	110.062
C	Penyusunan Pagu Anggaran	Layanan	1	1	1	1	1	29.194	35.194	33.194	33.194	36.500	167.276
D	Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran	Layanan	1	1	1	1	1	27.620	33.620	31.620	31.620	32.750	157.230
E	Review RENSTRA 2025-2029	Layanan	1	1	1	1	1	7.856	213.856	202.856	202.856	211.500	838.924
F	Perjanjian Kinerja	Layanan	1	1	1	1	1	7.804	13.804	12.804	12.804	14.450	61.666
G	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Layanan	1	1	1	1	1	19.760	25.760	23.760	23.760	24.750	117.790
H	Bimtek Aplikasi Perencanaan	Layanan	1	1	1	1	1	15.292	21.292	23.292	23.292	22.450	105.618
Komponen: [4627.EBD.952.052] Layanan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Dokumen	0	0	0	0	0	39.592	39.592	42.592	42.592	42.450	206.818

KOMPONEN / SUB KOMPONEN		Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
A	Penyusunan dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Layanan	1	1	1	1	1	39.592	39.592	42.592	42.592	42.450	206.818
Komponen: [4627.EBD.953.051] Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	0	0	0	0	0	45.280	63.280	65.280	63.280	63.280	300.400
A	LAKIP	Layanan	1	1	1	1	1	13.856	13.856	14.856	14.856	13.856	71.280
B	LAPTAH	Layanan	1	1	1	1	1	7.856	13.856	14.856	14.856	13.856	65.280
C	Penyusunan Laporan Monev PP39	Layanan	1	1	1	1	1	15.712	21.712	22.712	21.712	21.712	103.560
D	Penyusunan Statistik	Layanan	1	1	1	1	1	7.856	13.856	12.856	11.856	13.856	60.280
Komponen: [4627.EBD.955.051] Layanan Keuangan dan Perbendaharaan		Dokumen	0	0	0	0	0	161.440	185.440	171.700	156.700	171.440	846.720
A	Penyusunan Rencana Penarikan Dana	Layanan	1	1	1	1	1	17.184	17.184	18.184	18.184	17.184	87.920
B	SISTEM AKUNTANSI INSTANSI	Layanan	1	1	1	1	1	75.304	81.304	80.304	70.304	78.304	385.520
C	TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (TLHP)	Layanan	1	1	1	1	1	7.856	13.856	9.856	8.856	12.856	53.280
D	SABMN	Layanan	1	1	1	1	1	53.240	59.240	54.500	52.500	53.240	272.720
E	PNBP	Layanan	1	1	1	1	1	7.856	13.856	8.856	6.856	9.856	47.280

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BP3KSDMT Tahun 2025–2029 merupakan dokumen acuan dalam penetapan pembangunan jangka menengah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi. Renstra ini disusun sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja BP3KSDMT dalam kurun waktu lima (5) tahun.

Bahan penyusunan Rencana Strategis BP3KSDMT Tahun 2025–2029 dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan fungsi BP3KSDMT, serta mengacu pada cascading (penurunan) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang diadopsi ke tingkat Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas yang diamanatkan, diturunkan ke tingkat Eselon I (BPSDMP), hingga ke tingkat Unit Pelaksana Teknis, yaitu BP3KSDMT.

Rencana Strategis ini akan menampakkan hasil yang optimal apabila seluruh sumber daya manusia yang terlibat di lingkungan BP3KSDMT memiliki semangat meningkatkan kinerja dan profesionalisme, komitmen kuat terhadap program pengembangan dan indikator kinerja yang telah direncanakan dan disepakati bersama, serta kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem kerja yang terintegrasi.

Dokumen Renstra BP3KSDMT Tahun 2025-2029 dapat ditinjau ulang apabila terdapat perubahan yang mendasar dalam lingkungan strategis yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap arah kebijakan, target kinerja, maupun rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan.

5.2 Mekanisme Evaluasi dan Perubahan

Evaluasi pelaksanaan Renstra BP3KSDMT Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Mekanisme evaluasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Evaluasi Tahunan

Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Renstra BP3KSDMT dilaksanakan setiap tahun melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP BP3KSDMT disampaikan kepada Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan (PPSDMAP) dan Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) untuk selanjutnya dilakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi LAKIP menjadi dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya serta mendukung penilaian kinerja dalam rangka reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

b. Evaluasi Tengah Periode

Evaluasi pelaksanaan Renstra BP3KSDMT dilakukan paling sedikit satu kali pada pertengahan masa berlaku Renstra, yaitu pada pertengahan Tahun 2027. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan, serta melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan guna memastikan pencapaian target pada akhir periode perencanaan Tahun 2029.

c. Reviu dan Penyesuaian Renstra

Dalam rangka menjamin ketercapaian sasaran strategis secara optimal dan terkendali, Renstra BP3KSDMT dapat dilakukan reviu apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, perubahan arah strategis Kementerian Perhubungan, maupun dinamika lingkungan strategis lainnya. Reviu dan penyesuaian Renstra dilakukan dengan tetap mengacu pada Renstra PPSDMAP dan Renstra BPSDMP sebagai dokumen induk.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra BP3KSDMT menjadi bahan masukan dalam pengambilan keputusan pimpinan, penyusunan rencana kerja tahunan, serta peningkatan akuntabilitas kinerja BP3KSDMT dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan sumber daya manusia transportasi secara berkelanjutan.

LAMPIRAN I
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025-2029
BALAI PNDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBANGUNAN KARAKTER SDM TRANSPORTASI

dalam ribu rupiah

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Lokasi	Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN					UPT Pelaksana			
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	S.D	J.B	
BALAI PNDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBANGUNAN KARAKTER SDM TRANSPORTASI								42.031.052	61.344.522	54.759.079	59.290.532	64.445.636	281.870.820			
Sasaran Strategis: [SSp 6] Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan								42.031.052	61.344.522	54.759.079	59.290.532	64.445.636	281.870.820			
Indikator Strategis: [IKSSp 6.1] Indeks RB Kementerian Perhubungan								42.031.052	61.344.522	54.759.079	59.290.532	64.445.636	281.870.820			
Program: [WA] Dukungan Manajemen								42.031.052	61.344.522	54.759.079	59.290.532	64.445.636	281.870.820			
Prioritas Kementerian Perhubungan								42.031.052	61.344.522	54.759.079	59.290.532	64.445.636	281.870.820			
Sasaran Program: [SP 4] Meningkatnya Kualitas Tata Kelola yang Baik di BPSDMP								42.031.052	61.344.522	54.759.079	59.290.532	64.445.636	281.870.820			
Indikator Program: [IKP 4] Indeks Tata Kelola Lembaga BPSDMP		Nilai	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	42.031.052	61.344.522	54.759.079	59.290.532	64.445.636	281.870.820			
Kegiatan: [1979] Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan								17.745.061	29.858.337	29.124.699	36.195.938	39.356.364	152.280.399			
Sasaran Kegiatan: [SK 08] Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan								17.745.061	29.858.337	29.124.699	36.195.938	39.356.364	152.280.399			
Indikator Kegiatan: [IKK 20] Persentase Peserta Pelatihan Aparatur		%	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	17.745.061	29.858.337	29.124.699	36.195.938	39.356.364	152.280.399			
Klasifikasi Rincian Output: [1979.AEC] Kerjasama		Kesepakatan	4	6	8	10	12	118.076	187.672	119.250	115.750	62.500	603.248			
Rincian Output: [1979.AEC.001] Kerjasama		Kesepakatan	4	6	8	10	12	118.076	187.672	119.250	115.750	62.500	603.248			
Indikator Output: Jumlah Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan		Kesepakatan	4	6	8	10	12	118.076	187.672	119.250	115.750	62.500	603.248			
Komponen: [1979.AEC.001.051] Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait		Kesepakatan	4	6	8	10	12	118.076	187.672	119.250	115.750	62.500	603.248			
BP3KSDMT		Kab. Bandung	Kesepakatan	4	6	8	10	12	118.076	187.672	119.250	115.750	62.500	603.248		BP3KSDMT
12-5078 Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah (K/L dan BUMN/BUMD)		Kab. Bandung	Kesepakatan	2	2	4	5	6	43.612	83.848	44.000	43.250	55.000	269.710	RM	Non-Ops
12-5079 Kerja Sama Antar Instansi Swasta/Lembaga Terkait (PTN, PTS, SMA, SMP)		Kab. Bandung	Kesepakatan	2	4	4	5	6	74.464	103.824	75.250	72.500	7.500	333.538	RM	Non-Ops
Klasifikasi Rincian Output: [1979.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal		LAYANAN	3	3	3	3	3	281.724	500.035	305.442	278.000	284.650	1.649.851			
Rincian Output: [1979.EBA.963] Layanan Data dan Informasi		LAYANAN	3	3	3	3	3	281.724	500.035	305.442	278.000	284.650	1.649.851			
Indikator Output: Jumlah Layanan Data dan Informasi		LAYANAN	3	3	3	3	3	281.724	500.035	305.442	278.000	284.650	1.649.851			
Komponen: [1979.EBA.963.051] Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan		LAYANAN	2	2	2	2	2	211.012	424.323	233.022	205.550	212.200	1.286.107			
BP3KSDMT		Kab. Bandung	LAYANAN	2	2	2	2	2	211.012	424.323	233.022	205.550	212.200	1.286.107		BP3KSDMT
12-5080 Survey Kepuasan Masyarakat/Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat		Kab. Bandung	Layanan	1	1	1	1	1	66.772	181.280	67.772	66.800	70.450	453.074	RM	Non-Ops
12-5081 Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat		Kab. Bandung	Layanan	1	1	1	1	1	144.240	243.043	165.250	138.750	141.750	833.033	RM	Non-Ops
12-3225 Update Sistem Lainnya		Kab. Bogor	LAYANAN	0	0	1	1	0	0	722.644	737.097	0	1.459.741	RM	Non-Ops	
Komponen: [1979.EBA.963.053] Layanan Sistem Informasi		LAYANAN	1	1	1	1	1	70.712	75.712	72.420	72.450	72.450	363.744			

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Lokasi	Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN					S.D	J.B	UPT Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				2025-2029
BP3KSDMT	Kab. Bandung	LAYANAN	1	1	1	1	1	70.712	75.712	72.420	72.450	72.450	363.744			BP3KSDMT
12-5082		Penyusunan Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal	Layanan	1	1	1	1	1	70.712	75.712	72.420	72.450	72.450	363.744	RM	Non-Ops
Klasifikasi Rincian Output: [1979.EBB] Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit	1	97	87	28	182	1.332.882	4.525.046	9.015.000	16.310.000	19.133.250	50.316.178			
Rincian Output: [1979.EBB.951] layanan Sarana Internal		Unit	1	97	85	27	179	1.332.882	3.175.046	2.425.000	3.990.000	2.387.750	13.310.678			
Indikator Output: Jumlah layanan Sarana Internal		Unit	1	97	85	27	179	1.332.882	3.175.046	2.425.000	3.990.000	2.387.750	13.310.678			
Komponen: [1979.EBB.951.051] Kendaraan Bermotor		Unit	0	1	5	11	10	0	300.000	1.310.000	670.000	130.000	2.410.000			
BP3KSDMT	Kab. Bandung	Unit	0	1	5	11	10	0	300.000	1.310.000	670.000	130.000	2.410.000		BP3KSDMT	
12-5083		Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Listrik	Unit	0	1	1	1	0	0	0	1.250.000	600.000	0	1.850.000	RM	Modal
12-5084		Pengadaan Motor Dinas Fungsional	Unit	0	0	2	5	5	0	0	60.000	70.000	130.000	260.000	RM	Modal
12-5085		Pengadaan Kendaraan Angkutan Barang (pickup)	Unit	0	0	2	5	5	0	300.000	0	0	0	300.000	RM	Modal
Komponen: [1979.EBB.951.052] Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		Unit	1	1	0	5	5	1.332.882	1.200.216	0	2.950.000	1.600.000	7.083.098			
BP3KSDMT	Kab. Bandung	Unit	1	1	0	5	5	1.332.882	1.200.216	0	2.950.000	1.600.000	7.083.098		BP3KSDMT	
12-5086		Pengadaan videotron indoor Aula Gedung Satria	Unit	1	0	0	0	0	1.332.882	0	0	0	0	1.332.882	RM	Modal
12-5087		Pengadaan Kabel FO	Unit	0	1	0	0	0	0	1.200.216	0	0	0	1.200.216	RM	Modal
12-5088		Aplikasi/Server Data Base Hasil Diklat	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	RM	Modal
12-5089		Pengadaan Cloud Storage	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	RM	Modal
12-5090		Pengeras Suara Portable	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	100.000	0	100.000	RM	Modal
12-5091		Drone	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	200.000	0	200.000	RM	Modal
12-5092		Pengadaan Peralatan Dokumentasi	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	150.000	0	150.000	RM	Modal
12-5093		Revitalisasi Jaringan Mekanikal Elektrikal Kawasan	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	200.000	200.000	RM	Modal
12-5094		Revitalisasi Jaringan Pipa Hidrant Dan APAR Kawasan Asrama	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	400.000	400.000	RM	Modal
12-5095		Revitalisasi Jaringan Pipa Hidrant Dan APAR Kawasan Bangunan Kelas	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	600.000	600.000	RM	Modal
12-5096		Revitalisasi Jaringan Mekanikal Elektrikal Kawasan	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	200.000	200.000	RM	Modal
12-5097		Revitalisasi Jaringan Pipa Hidrant Dan APAR Kawasan Asrama	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	200.000	200.000	RM	Modal
Komponen: [1979.EBB.951.053] Peralatan Fasilitas Perkantoran		Unit	0	95	80	11	164	0	1.674.830	1.115.000	370.000	657.750	3.817.580			
BP3KSDMT	Kab. Bandung	Unit	0	95	80	11	164	0	1.674.830	1.115.000	370.000	657.750	3.817.580		BP3KSDMT	
12-5098		Pengadaan Kulkas	Unit	0	5	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	RM	Modal
12-5099		Pengadaan Laptop	Unit	0	10	10	10	0	0	98.000	155.000	170.000	0	423.000	RM	Modal
12-5100		Pengadaan Printer	Unit	0	5	0	0	0	0	47.500	0	0	0	47.500	RM	Modal
12-5101		Pengadaan Utilitas Lapangan	Unit	0	3	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	RM	Modal
12-5102		Pengadaan Rak Perlengkapan Diklat	Unit	0	30	0	0	0	0	255.000	0	0	0	255.000	RM	Modal
12-5103		Pengadaan Lemari Kaca	Unit	0	30	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	RM	Modal
12-5104		Pengadaan Flying Fox	Unit	0	1	0	0	0	0	352.330	0	0	0	352.330	RM	Modal
12-5105		Pengadaan Peralatan Diklat	Unit	0	1	0	0	0	0	300.000	300.000	0	400.000	1.000.000	RM	Modal
12-5106		Meja Kerja	Unit	0	1	30	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000	RM	Modal
12-5107		Kursi	Unit	0	1	30	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	RM	Modal
12-5108		Personal Computer	Unit	0	1	10	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	RM	Modal
12-5109		Mesin Fotocopy	Unit	0	1	0	1	0	0	0	0	200.000	0	200.000	RM	Modal
12-5110		Pengadaan Peralatan Kesehatan	Unit	0	1	0	0	104	0	0	0	0	218.750	218.750	RM	Modal
12-5111		Kebutuhan Linen (sarung bantal. Sprei, selimut)	Unit	0	1	0	0	12	0	0	0	0	34.000	34.000	RM	Modal
12-5112		Bantal	Unit	0	1	0	0	12	0	0	0	0	5.000	5.000	RM	Modal
12-5113		Scanner	Unit	0	1	0	0	12	0	21.600	0	0	0	21.600	RM	Modal
12-5114	Penghancur Kertas Micro Cut	Unit	0	1	0	0	12	0	4.500	0	0	0	4.500	RM	Modal	
12-5115	Tempat Sampah	Unit	0	1	0	0	12	0	5.900	0	0	0	5.900	RM	Modal	
Rincian Output: [1979.EBB.971] Layanan Prasarana Internal		Unit	0	0	2	1	3	0	1.350.000	6.590.000	12.320.000	16.745.500	37.005.500			
Indikator Output: Jumlah layanan Prasarana Internal		Unit	0	0	2	1	3	0	1.350.000	6.590.000	12.320.000	16.745.500	37.005.500			

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Lokasi	Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN					UPT Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	S.D	J.B
Komponen: [1979.EBB.971.052] Tanah untuk pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan		Unit	0	0	2	1	3	0	1.350.000	6.590.000	12.320.000	16.745.500	37.005.500		
BP3KSDMT	Kab. Bandung	Unit	0	0	2	1	3	0	1.350.000	6.590.000	12.320.000	16.745.500	37.005.500		
12-5116 Jasa Konsultan Supervisi Pembangunan Gudang Sarana dan Prasarana Diklat		Paket	0	1	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	RM	Modal
12-5117 DED Pembangunan Toilet Permanen		Dokumen	0	1	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	RM	Modal
12-5118 DED Pembangunan Service Area		Dokumen	0	1	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	RM	Modal
12-5119 jasa konsultan Penyusunan DED Fire Hydrant		Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000	RM	Modal
12-5120 jasa konsultan Penyusunan DED Instalasi Listrik		Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	270.000	0	0	270.000	RM	Modal
12-5121 jasa konsultan Penyusunan DED Instalasi Air		Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000	RM	Modal
12-5122 Pembangunan Gudang Sarana dan Prasarana Diklat		Unit	0	0	1	0	0	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000	RM	Modal
12-5123 Pengadaan Tanah		Paket	0	0	1	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	RM	Modal
12-5124 Hotmix Jalan Akses		Paket	0	0	1	0	0	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000	RM	Modal
12-5125 Pembangunan Kantin		Unit	0	0	1	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	RM	Modal
12-5126 Pemasangan Paving block		Paket	0	0	1	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000	RM	Modal
12-5127 Pembangunan Gedung Auditorium		Unit	0	0	0	1	1	0	0	11.000.000	12.000.000	23.000.000	RM	Modal	
12-5128 Reviu DED Flat tahap 2		Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000	RM	Modal
12-5129 DED Gedung Auditorium		Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000	RM	Modal
12-5130 DED Fire Hydrant		Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	120.000	0	120.000	RM	Modal
12-5131 Pengadaan Fire Hydrant		Paket	0	0	0	1	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	RM	Modal
12-5132 Pembangunan Bengkel		Paket	0	0	0	0	1	0	0	0	0	400.000	400.000	RM	Modal
12-5133 Pembangunan Kamar Mandi/WC		Paket	0	0	0	0	1	0	0	0	0	300.000	300.000	RM	Modal
12-5134 Gudang Umum		Paket	0	0	0	0	1	0	0	0	0	500.000	500.000	RM	Modal
12-5135 Instalasi Pengolahan Air Limbah		Paket	0	0	0	0	1	0	0	0	0	500.000	500.000	RM	Modal
12-5136 Ruang Penampungan Tempat Sampah Sementara		Paket	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100.000	100.000	RM	Modal
12-5137 DED Jaringan IT		Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	135.000	135.000	RM	Modal
12-5138 Renovasi Gedung Utama		Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000	RM	Modal
12-5139 Renovasi Gedung Audiovisual		Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000	RM	Modal
12-5140 Pengadaan Muebeler Klinik		Paket	0	0	0	0	1	0	0	0	0	160.500	160.500	RM	Modal
12-5141 Review Master Plan 2025 - 2029		Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	350.000	350.000	RM	Modal
Klasifikasi Rincian Output: [1979.EBC] Layanan Manajemen SDM Internal		ORANG	7.048	10.250	10.250	10.258	10.262	16.012.379	24.645.584	19.685.007	19.492.188	19.875.964	99.711.122		
Rincian Output: [1979.EBC.954] Layanan Manajemen SDM Internal		ORANG	6	30	30	38	42	134.682	428.940	200.000	204.700	260.500	1.228.822		
Indikator Output: Jumlah Layanan Manajemen SDM		ORANG	6	30	30	38	42	134.682	428.940	200.000	204.700	260.500	1.228.822		
Komponen: [1979.EBC.954.051] Tenaga Pendidik yang Kompeten		ORANG	3	10	10	12	12	54.894	162.980	95.000	96.000	115.000	523.874		
BP3KSDMT	Kab. Bandung	ORANG	3	10	10	12	12	54.894	162.980	95.000	96.000	115.000	523.874		
12-5142 Diklat Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik		Orang	3	10	10	12	12	54.894	162.980	95.000	96.000	115.000	523.874	RM	Non-Ops
Komponen: [1979.EBC.954.052] Tenaga Kependidikan yang Kompeten		ORANG	3	20	20	26	30	79.788	265.960	105.000	108.700	145.500	704.948		
BP3KSDMT	Kab. Bandung	ORANG	3	20	20	26	30	79.788	265.960	105.000	108.700	145.500	704.948		
12-5143 Diklat Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik		Orang	3	20	20	26	30	79.788	265.960	105.000	108.700	145.500	704.948	RM	Non-Ops
Rincian Output: [1979.EBC.996] Layanan Pendidikan dan Pelatihan		ORANG	7.042	10.220	10.220	10.220	10.220	15.877.697	24.216.644	19.485.007	19.287.488	19.615.464	98.482.300		
Indikator Output: Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan		ORANG	7.042	10.220	10.220	10.220	10.220	15.877.697	24.216.644	19.485.007	19.287.488	19.615.464	98.482.300		
Komponen: [1979.EBC.996.000] Diklat Training of Facilitator (TOF) Pengasuh Taruna/Mahasiswa		Orang	0	200	200	200	200	0	747.388	747.388	747.388	747.388	2.989.552		
BP3KSDMT	Kab. Bandung	Orang	0	200	200	200	200	0	747.388	747.388	747.388	747.388	2.989.552		
12-5149 Diklat Training of Facilitator (TOF) Pengasuh Taruna/Mahasiswa		Orang	0	200	200	200	200	0	747.388	747.388	747.388	747.388	2.989.552	RM	Non-Ops
Komponen: [1979.EBC.996.097] Diklat Pembangunan Karakter Dimasial Tk. III		Orang	80	80	80	80	80	439.760	484.104	454.104	484.104	484.104	2.346.176		
BP3KSDMT	Kab. Bandung	Orang	80	80	80	80	80	439.760	484.104	454.104	484.104	484.104	2.346.176		
12-5144 DIKLAT PEMBAKAR PKA/PIM III		Orang	80	80	80	80	80	439.760	484.104	454.104	484.104	484.104	2.346.176	RM	Non-Ops

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Lokasi	Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN					UPT Pelaksana			
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	S.D	J.B	
Komponen: [1979.EBC.996.098] Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. IV	Kab. Bandung	Orang	80	80	80	80	80	871.520	488.104	488.104	488.104	488.104	2.823.936			BP3KSDMT
BP3KSDMT		Orang	80	80	80	80	80	871.520	488.104	488.104	488.104	488.104	2.823.936	RM	Non-Ops	
12-5145 Komponen: [1979.EBC.996.099] Diklat Pembangunan Karakter Taruna (CPNS)	Kab. Bandung	Orang	2.520	2.960	2.960	2.960	2.960	5.821.620	7.402.372	7.305.611	7.402.372	7.202.372	35.134.347			BP3KSDMT
BP3KSDMT		Orang	2.520	2.960	2.960	2.960	2.960	5.821.620	7.402.372	7.305.611	7.402.372	7.202.372	35.134.347	RM	Non-Ops	
12-5146 Komponen: [1979.EBC.996.100] Diklat Pembangunan Karakter Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kab. Bandung	Orang	50	200	200	200	200	142.632	551.856	451.856	411.856	441.856	2.000.056			BP3KSDMT
BP3KSDMT		Orang	50	200	200	200	200	142.632	551.856	451.856	411.856	441.856	2.000.056	RM	Non-Ops	
12-5147 Komponen: [1979.EBC.996.101] Diklat Pembangunan Karakter Calon Taruna	Kab. Bandung	Orang	712	700	700	700	700	2.731.138	4.742.940	3.752.656	3.242.940	3.442.940	17.912.614			BP3KSDMT
BP3KSDMT		Orang	712	700	700	700	700	2.731.138	4.742.940	3.752.656	3.242.940	3.442.940	17.912.614	RM	Non-Ops	
12-5148 Komponen: [1979.EBC.996.501] Pelatihan Kerja Sama	Kab. Bandung	ORANG	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000	5.871.027	9.799.880	6.285.288	6.510.724	6.808.700	35.275.619			BP3KSDMT
BP3KSDMT		ORANG	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000	5.871.027	9.799.880	6.285.288	6.510.724	6.808.700	35.275.619			
12-5150 Diklat Pembangunan Karakter Tingkat SMA/SMK (Madatukar Mandiri) PNPB		Orang	600	1500	1500	1500	1500	1.392.680	3.656.840	1.801.941	2.017.377	1.892.680	10.761.518	PNBP	Non-Ops	
12-5151 Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi Bagi Masyarakat/Umum PNPB		Orang	3000	4500	4500	4500	4500	4.353.347	5.888.040	4.353.347	4.353.347	4.701.020	23.649.101	PNBP	Non-Ops	
12-5152 Dukungan Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Diklat		Unit	10	20	20	20	20	125.000	255.000	130.000	140.000	215.000	865.000	RM	Non-Ops	
Kegiatan: [4626] Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi								1.027.172	1.250.420	1.109.490	1.101.740	1.230.400	5.719.222			
Sasaran Kegiatan: [SK 09] Terwujudnya Organisasi yang Agile dan SDM Unggul								1.027.172	1.250.420	1.109.490	1.101.740	1.230.400	5.719.222			
Indikator Kegiatan: [IKK 22] Indeks Profesionalisme ASN		Indeks	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	1.027.172	1.250.420	1.109.490	1.101.740	1.230.400	5.719.222			
Klasifikasi Rincian Output: [4626.EBC] Layanan Manajemen SDM Internal		Orang	0	0	0	0	0	1.027.172	1.250.420	1.109.490	1.101.740	1.230.400	5.719.222			
Rincian Output: [4626.EBC.954] Layanan Manajemen SDM Internal		Orang	0	0	0	0	0	1.027.172	1.250.420	1.109.490	1.101.740	1.230.400	5.719.222			
Indikator Output: Jumlah Layanan Manajemen SDM		Orang	0	0	0	0	0	1.027.172	1.250.420	1.109.490	1.101.740	1.230.400	5.719.222			
Komponen: [4626.EBC.954.051] Layanan Kepegawaian	Kab. Bandung	Orang	0	0	0	0	0	1.027.172	1.250.420	1.109.490	1.101.740	1.230.400	5.719.222			BP3KSDMT
BP3KSDMT		Orang	0	0	0	0	0	1.027.172	1.250.420	1.109.490	1.101.740	1.230.400	5.719.222			
12-5153 SOSIALISASI PERATURAN PEGAWAI		Layanan	1	1	1	1	1	162.720	163.840	172.000	175.250	180.000	853.810	RM	Non-Ops	
12-5154 KENAIKAN PANGKAT		Layanan	1	1	1	1	1	47.136	47.136	48.750	48.750	52.500	254.272	RM	Non-Ops	
12-5155 KESEMAPTAAN PEGAWAI		Layanan	1	1	1	1	1	273.700	298.700	300.450	300.450	314.750	1.488.050	RM	Non-Ops	
12-5156 PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL		Layanan	1	1	1	1	1	15.712	25.712	18.500	16.500	17.500	93.924	RM	Non-Ops	
12-5157 PENYUSUNAN FORMASI		Layanan	1	1	1	1	1	15.712	25.712	18.500	16.500	17.500	93.924	RM	Non-Ops	
12-5158 PENYUSUNAN LHKPN DAN E-PUPNS PEGAWAI		Layanan	1	1	1	1	1	15.712	20.712	18.500	16.500	17.500	88.924	RM	Non-Ops	
12-5159 PENYELENGGARAAN/PENGELOLAAN SIM DAN PPIID		Layanan	1	1	1	1	1	29.712	34.712	32.750	32.750	35.750	165.674	RM	Non-Ops	
12-5160 PENYUSUNAN DATABASE KEPEGAWAIAN		Layanan	1	1	1	1	1	15.712	25.712	18.500	16.500	17.500	93.924	RM	Non-Ops	
12-5161 UJIAN DINAS		Layanan	1	1	1	1	1	15.712	20.712	18.500	16.500	17.500	88.924	RM	Non-Ops	
12-5162 PENINGKATAN MOTIVASI BAGI PEGAWAI BP3KSDM TRANSPORTASI		Layanan	1	1	1	1	1	401.000	533.128	425.000	425.000	515.000	2.299.128	RM	Non-Ops	
12-5163 DAFTAR URUT KEPANGKATAN		Layanan	1	1	1	1	1	18.632	23.632	19.540	18.540	22.450	102.794	RM	Non-Ops	
12-5164 PENGELOLAAN DATA PEGAWAI		Layanan	1	1	1	1	1	15.712	20.712	18.500	18.500	22.450	95.874	RM	Non-Ops	
Kegiatan: [4627] Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum SDM Transportasi								23.258.819	30.235.765	24.524.890	21.992.854	23.858.872	123.871.199			

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Lokasi	Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN					UPT Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	S.D	J.B
Sasaran Kegiatan: [SK 10] Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi pada Layanan Prima								23.258.819	30.235.765	24.524.890	21.992.854	23.858.872	123.871.199		
Indikator Kegiatan: [IKK 24] Persentase Pemenuhan Akuntabilitas di Lingkungan BPSDMP		%	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	22.819.015	29.511.961	23.822.826	21.307.790	23.142.102	120.603.693		
Klasifikasi Rincian Output: [4627.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan	10	10	10	10	10	22.819.015	29.511.961	23.822.826	21.307.790	23.142.102	120.603.693		
Rincian Output: [4627.EBA.962] Layanan Umum		Layanan	4	4	4	4	4	2.536.613	3.056.584	2.650.943	2.489.122	2.632.019	13.365.280		
Indikator Output: Jumlah Layanan Umum		Layanan	4	4	4	4	4	2.536.613	3.056.584	2.650.943	2.489.122	2.632.019	13.365.280		
Komponen: [4627.EBA.962.052] Layanan Umum dan Perlengkapan		Layanan	4	4	4	4	4	2.536.613	3.056.584	2.650.943	2.489.122	2.632.019	13.365.280		
BP3KSDMT		Layanan	4	4	4	4	4	2.536.613	3.056.584	2.650.943	2.489.122	2.632.019	13.365.280		
12-5165 Medical Check Up Pegawai	Kab. Bandung	Layanan	1	1	1	1	1	96.000	108.000	98.000	98.000	105.000	505.000	RM	Non-Ops
12-5166 Kehumasan dan Publikasi		Layanan	1	1	1	1	1	110.000	140.000	120.000	110.000	135.000	615.000	RM	Non-Ops
12-5167 Penyelenggaraan Keprotokolan dan Humas		Layanan	1	1	1	1	1	35.712	65.712	38.250	38.250	65.450	243.374	RM	Non-Ops
12-5168 Rapat-rapat koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Pokja/Rapat Kerja/Pimpinan/Dinas		Layanan	1	1	1	1	1	2.294.901	2.742.872	2.394.693	2.242.872	2.326.569	12.001.906	RM	Non-Ops
Rincian Output: [4627.EBA.994] Layanan Perkantoran		Layanan	6	6	6	6	6	20.282.402	26.455.377	21.171.883	18.818.668	20.510.083	107.238.413		
Indikator Output: Jumlah Layanan Perkantoran		Layanan	6	6	6	6	6	20.282.402	26.455.377	21.171.883	18.818.668	20.510.083	107.238.413		
Komponen: [4627.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan		Layanan	1	1	1	1	1	6.815.713	7.980.034	7.090.034	6.996.488	7.283.171	36.165.440		
BP3KSDMT		Layanan	1	1	1	1	1	6.815.713	7.980.034	7.090.034	6.996.488	7.283.171	36.165.440		
12-5169 Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Kab. Bandung	Layanan	1	1	1	1	1	6.815.713	7.980.034	7.090.034	6.996.488	7.283.171	36.165.440	RM	Pegawai
Komponen: [4627.EBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Layanan	5	5	5	5	5	13.466.689	18.475.343	14.081.849	11.822.180	13.226.912	71.072.973		
BP3KSDMT		Layanan	5	5	5	5	5	13.466.689	18.475.343	14.081.849	11.822.180	13.226.912	71.072.973		
12-5170 Kebutuhan Sehari - hari Perkantoran	Kab. Bandung	Layanan	1	1	1	1	1	5.933.379	7.766.573	6.392.483	5.364.846	5.966.573	31.423.854	RM	Ops
12-5171 Langganan Daya dan Jasa		Layanan	1	1	1	1	1	996.120	1.056.120	1.000.120	1.000.120	1.056.120	5.108.600	RM	Ops
12-5172 Pemeliharaan Kantor		Layanan	1	1	1	1	1	6.234.582	9.275.042	6.391.638	5.159.606	5.856.611	32.917.479	RM	Ops
12-5173 Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor		Layanan	1	1	1	1	1	127.608	127.608	127.608	127.608	127.608	638.040	RM	Ops
12-5174 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Padat Karya)		Layanan	1	1	1	1	1	175.000	250.000	170.000	170.000	220.000	985.000	RM	Ops
Indikator Kegiatan: [IKK 26] Nilai SAKIP		Nilai	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	278.364	538.364	530.364	528.364	545.330	2.420.786		
Klasifikasi Rincian Output: [4627.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen	0	0	0	0	0	278.364	538.364	530.364	528.364	545.330	2.420.786		
Rincian Output: [4627.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen	0	0	0	0	0	233.084	475.084	465.084	465.084	482.050	2.120.386		
Indikator Output: Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen	0	0	0	0	0	233.084	475.084	465.084	465.084	482.050	2.120.386		
Komponen: [4627.EBD.952.051] Layanan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		Dokumen	0	0	0	0	0	193.492	435.492	422.492	422.492	439.600	1.913.568		
BP3KSDMT		Dokumen	0	0	0	0	0	193.492	435.492	422.492	422.492	439.600	1.913.568		
12-5175 Penyusunan Pagu Kebutuhan	Kab. Bandung	Layanan	1	1	1	1	1	70.638	70.638	70.638	70.638	72.450	355.002	RM	Non-Ops
12-5176 Penyusunan Pagu Indikatif		Layanan	1	1	1	1	1	15.328	21.328	24.328	24.328	24.750	110.062	RM	Non-Ops
12-5177 Penyusunan Pagu Anggaran		Layanan	1	1	1	1	1	29.194	35.194	33.194	33.194	36.500	167.276	RM	Non-Ops
12-5178 Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran		Layanan	1	1	1	1	1	27.620	33.620	31.620	31.620	32.750	157.230	RM	Non-Ops
12-5179 Review RENSTRA 2025 - 2029		Layanan	1	1	1	1	1	7.856	213.856	202.856	202.856	211.500	838.924	RM	Non-Ops
12-5180 Perjanjian Kinerja		Layanan	1	1	1	1	1	7.804	13.804	12.804	12.804	14.450	61.666	RM	Non-Ops
12-5181 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)		Layanan	1	1	1	1	1	19.760	25.760	23.760	23.760	24.750	117.790	RM	Non-Ops
12-5182 Bimtek Aplikasi Perencanaan		Layanan	1	1	1	1	1	15.292	21.292	23.292	23.292	22.450	105.618	RM	Non-Ops

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Lokasi	Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN					UPT Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	S.D	J.B
Komponen: [4627.EBD.952.052] Layanan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BP3KSDMT		Dokumen	0	0	0	0	0	39.592	39.592	42.592	42.592	42.450	206.818		
12-5183 Penyusunan dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Kab. Bandung	Dokumen	0	0	0	0	0	39.592	39.592	42.592	42.592	42.450	206.818		
		Layanan	1	1	1	1	1	39.592	39.592	42.592	42.592	42.450	206.818	RM	Non-Ops
Rincian Output: [4627.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	0	0	0	0	0	45.280	63.280	65.280	63.280	63.280	300.400		
Indikator Output: Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	0	0	0	0	0	45.280	63.280	65.280	63.280	63.280	300.400		
Komponen: [4627.EBD.953.051] Layanan Pemantauan dan Evaluasi BP3KSDMT		Dokumen	0	0	0	0	0	45.280	63.280	65.280	63.280	63.280	300.400		
12-5184 LAKIP	Kab. Bandung	Dokumen	0	0	0	0	0	45.280	63.280	65.280	63.280	63.280	300.400		
		Layanan	1	1	1	1	1	13.856	13.856	14.856	14.856	13.856	71.280	RM	Non-Ops
12-5185 LAPTAH		Layanan	1	1	1	1	1	7.856	13.856	14.856	14.856	13.856	65.280	RM	Non-Ops
12-5186 Penyusunan Laporan Movev PP39		Layanan	1	1	1	1	1	15.712	21.712	22.712	21.712	21.712	103.560	RM	Non-Ops
12-5187 Penyusunan Statistik		Layanan	1	1	1	1	1	7.856	13.856	12.856	11.856	13.856	60.280	RM	Non-Ops
Indikator kegiatan: [IKK 25] Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA)		Nilai	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	161.440	185.440	171.700	156.700	171.440	846.720		
Klasifikasi Rincian Output: [4627.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen	0	0	0	0	0	161.440	185.440	171.700	156.700	171.440	846.720		
Rincian Output: [4627.EBD.955] Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	0	0	0	0	0	161.440	185.440	171.700	156.700	171.440	846.720		
Indikator Output: Jumlah Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	0	0	0	0	0	161.440	185.440	171.700	156.700	171.440	846.720		
Komponen: [4627.EBD.955.051] Layanan Keuangan dan Perbendaharaan BP3KSDMT		Dokumen	0	0	0	0	0	161.440	185.440	171.700	156.700	171.440	846.720		
12-5188 Penyusunan Rencana Penarikan Dana	Kab. Bandung	Dokumen	0	0	0	0	0	161.440	185.440	171.700	156.700	171.440	846.720		
		Layanan	1	1	1	1	1	17.184	17.184	18.184	18.184	17.184	87.920	RM	Non-Ops
12-5189 SISTEM AKUNTANSI INSTANSI		Layanan	1	1	1	1	1	75.304	81.304	80.304	70.304	78.304	385.520	RM	Non-Ops
12-5190 TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (TLHP)		Layanan	1	1	1	1	1	7.856	13.856	9.856	8.856	12.856	53.280	RM	Non-Ops
12-5191 SABMN		Layanan	1	1	1	1	1	53.240	59.240	54.500	52.500	53.240	272.720	RM	Non-Ops
12-5192 PNPB		Layanan	1	1	1	1	1	7.856	13.856	8.856	6.856	9.856	47.280	RM	Non-Ops

Pagu Jangka Menengah (JM) Tahun 2025 – 2029
Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi

a. Berdasarkan Jenis Program

(dalam ribuan rupiah)

PROGRAM	TAHUN ANGGARAN					TOTAL
	2025	2026	2027	2028	2029	
Pendidikan Vokasi						
Dukungan Manajemen	42.031.052	61.344.522	54.759.079	59.290.532	64.445.635	281.870.820
TOTAL ANGGARAN	42.031.052	61.344.522	54.759.079	59.290.532	64.445.635	281.870.820

b. Berdasarkan Sumber Dana

(dalam ribuan rupiah)

SUMBER DANA	TAHUN ANGGARAN					TOTAL
	2025	2026	2027	2028	2029	
Rupiah Murni	36.285.025	51.799.642	48.603.791	52.919.808	57.851.935	247.460.201
Badan Layanan Umum						
PNBP	5.746.027	9.544.880	6.155.288	6.370.724	6.593.700	34.410.619
SBSN						
TOTAL ANGGARAN	42.031.052	61.344.522	54.759.079	59.290.532	64.445.635	281.870.820

c. Berdasarkan Jenis Belanja

(dalam ribuan rupiah)

JENIS BELANJA	TAHUN ANGGARAN					TOTAL
	2025	2026	2027	2028	2029	
Belanja Barang Non Ops Barang/Jasa	20.415.768	30.364.099	24.572.196	24.161.864	24.802.303	124.316.230
Belanja Non Ops Modal	1.332.882	4.525.046	9.015.000	16.310.000	19.133.250	50.316.178
Belanja Operasional Barang/Jasa	13.466.689	18.475.343	14.081.849	11.822.180	13.226.912	71.072.973
Belanja Operasional Pegawai	6.815.713	7.980.034	7.090.034	6.996.488	7.283.171	36.165.440
TOTAL ANGGARAN	42.031.052	61.344.522	54.759.079	59.290.532	64.445.635	281.870.820

d. Rincian Usulan Kegiatan Belanja Modal

(dalam miliar rupiah)

PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO/KOMP/ SUB.KOMP	URAIAN KEGIATAN	RM/BLU/ SBSN	TAHUN ANGGARAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
1979.EBB.951.051.A	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Listrik	RM			1,250	0,600	
1979.EBB.951.051.B	Pengadaan Motor Dinas Fungsional	RM			0,060	0,070	0,130
1979.EBB.951.051.C	Pengadaan Kendaraan Angkutan Barang (pickup)	RM		0,300			
1979.EBB.951.052.A	Pengadaan videotron indoor Aula Gedung Satria	RM	1,332				
1979.EBB.951.052.B	Pengadaan Kabel FO	RM		1,200			
1979.EBB.951.052.C	Aplikasi/Server Data Base Hasil Diklat	RM				1,000	
1979.EBB.951.052.D	Pengadaan Cloud Storage	RM				1,500	
1979.EBB.951.052.E	Pengeras Suara Portable	RM				0,100	
1979.EBB.951.052.F	Drone	RM				0,200	
1979.EBB.951.052.G	Pengadaan Peralatan Dokumentasi	RM				0,150	
1979.EBB.951.052.H	Revitalisasi Jaringan Mekanikal Elektrikal Kawasan	RM					0,400
1979.EBB.951.052.I	Revitalisasi Jaringan Pipa Hidrant Dan APAR Kawasan Asrama	RM					0,600
1979.EBB.951.052.J	Revitalisasi Jaringan Pipa Hidrant Dan APAR Kawasan Bangunan Kelas	RM					0,600
1979.EBB.951.053.A	Pengadaan Kulkas	RM		0,040			
1979.EBB.951.053.B	Pengadaan Laptop	RM		0,098	0,155	0,170	
1979.EBB.951.053.C	Pengadaan Printer	RM		0,048			
1979.EBB.951.053.D	Pengadaan Utilitas Lapangan	RM		0,400			
1979.EBB.951.053.E	Pengadaan Rak Perlengkapan Diklat	RM		0,255			
1979.EBB.951.053.F	Pengadaan Lemari Kaca	RM		0,150			
1979.EBB.951.053.G	Pengadaan Flying Fox	RM		0,352			
1979.EBB.951.053.H	Pengadaan Peralatan Diklat	RM		0,300	0,300		0,400
1979.EBB.951.053.I	Meja Kerja	RM			0,180		
1979.EBB.951.053.J	Kursi	RM			0,080		
1979.EBB.951.053.K	Personal Computer	RM			0,400		
1979.EBB.951.053.L	Mesin Fotocopy	RM				0,200	
1979.EBB.951.053.M	Pengadaan Peralatan Kesehatan	RM					0,218
1979.EBB.951.053.N	Kebutuhan Linen (sarung bantal. Sprei, selimut)	RM					0,034
1979.EBB.951.053.O	Bantal	RM					0,005

PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO/KOMP/ SUB.KOMP	URAIAN KEGIATAN	RM/BLU/ SBSN	TAHUN ANGGARAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	
1979.EBB.951.053.P	Scanner	RM		0,022				
1979.EBB.951.053.Q	Penghancur Kertas Micro Cut	RM		0,004				
1979.EBB.951.053.R	Tempat Sampah	RM		0,006				
1979.EBB.971.052.A	Jasa Konsultan Supervisi Pembangunan Gudang Sarana dan Prasarana Diklat	RM		0,150				
1979.EBB.971.052.B	DED Pembangunan Toilet Permanen	RM		0,100				
1979.EBB.971.052.C	DED Pembangunan Service Area	RM		0,100				
1979.EBB.971.052.D	jasa konsultan Penyusunan DED Fire Hydrant	RM			0,280			
1979.EBB.971.052.E	jasa konsultan Penyusunan DED Instalasi Listrik	RM			0,270			
1979.EBB.971.052.F	jasa konsultan Penyusunan DED Instalasi Air	RM			0,260			
1979.EBB.971.052.G	Pembangunan Gudang Sarana dan Prasarana Diklat	RM			1,400			
1979.EBB.971.052.H	Pengadaan Tanah	RM		1,000				
1979.EBB.971.052.I	Hotmix Jalan Akses	RM			1,800			
1979.EBB.971.052.J	Pembangunan Kantin	RM			1,500			
1979.EBB.971.052.K	Pemasangan Paving block	RM			0,550			
1979.EBB.971.052.L	Pembangunan Gedung Auditorium	RM				11,000	12,000	
1979.EBB.971.052.M	Reviu DED Flat tahap 2	RM			0,350			
1979.EBB.971.052.N	DED Gedung Auditorium	RM			0,180			
1979.EBB.971.052.O	DED Fire Hydrant	RM				0,120		
1979.EBB.971.052.P	Pengadaan Fire Hydrant	RM				1,200		
1979.EBB.971.052.Q	Pembangunan Bengkel	RM						0,400
1979.EBB.971.052.R	Pembangunan Kamar Mandi/WC	RM						0,300
1979.EBB.971.052.S	Gudang Umum	RM						0,500
1979.EBB.971.052.T	Instalasi Pengolahan Air Limbah	RM						0,500
1979.EBB.971.052.U	Ruang Penampungan Tempat Sampah Sementara	RM						0,100
1979.EBB.971.052.V	DED Jaringan IT	RM						0,135
1979.EBB.971.052.W	Renovasi Gedung Utama	RM						1,150
1979.EBB.971.052.X	Renovasi Gedung Audiovisual	RM						1,150
1979.EBB.971.052.Y	Pengadaan Muebeler Klinik	RM						0,160
1979.EBB.971.052.Z	Review Master Plan 2025 - 2029	RM						0,350
TOTAL ANGGARAN			1,332	4,525	9,015	16,310	19,133	